



Sumber gambar: mindand / Freepik

LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN

TAHUN 2020



Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan
Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
BAB 1 PENDAHULUAN	5
1.1. Latar Belakang	5
Restrukturisasi Organisasi	5
Pandemi Covid-19	6
1.2. Tugas dan Fungsi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	7
1.3. Tugas	7
1.4. Fungsi	7
1.5. Struktur Organisasi	8
1.6. Isu Strategis	9
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	12
2.1. Uraian Singkat Renstra	12
2.1.1. Tujuan	12
2.1.2. Sasaran Strategis	12
2.1.3. Arah Kebijakan	13
2.1.4. Strategi	14
2.1.5. Program Teknis	15
2.2. Perjanjian Kinerja	15
2.3. Metode Pengukuran	17
2.4. Target 2020 Berdasarkan Rencana Strategis	20
BAB 3 KAPASITAS ORGANISASI	22
3.1. Sumber daya Manusia	22
3.2. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas SDM	25
3.3. Sarana dan prasarana	26
3.4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)	27
BAB 4 AKUNTABILITAS KINERJA	34
4.1. Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	34
4.1.1. Perbandingan kinerja Organisasi	56
4.2. Realisasi Anggaran	60
BAB 5 PENUTUP	68
5.1. Kesimpulan	68
5.2. Langkah Ke Depan	72
LAMPIRAN	115

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua. Dan atas izin-Nya Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan ini dapat diselesaikan.

Penyusunan LAKIN merupakan amanah Instruksi Presiden Nomor 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan penyusunan laporan ini berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Penyusunan LAKIN selain merupakan upaya konkrit dalam mewujudkan akuntabilitas, transparansi, dan produktivitas kinerja, tetapi juga sebagai laporan pertanggungjawaban Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

Melalui LAKIN Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun 2020, Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2020, sesuai yang tertuang dalam Rencana Strategi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan merujuk pada indikator kinerja berupa input, output, dan outcome yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja dan direalisasikan.

LAKIN Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun 2020 disusun berdasarkan masukan dari seluruh sub bidang kerja di lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan kekurangan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pada tahun 2019. Demikian laporan ini disusun, semoga laporan ini bermanfaat.

Jakarta, Januari 2021

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

R. Haryo Bakti Martoyoedo, S.T., M.Sc.
NIP. 197008201997031002

BAB

1

PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi dan isu strategis yang dihadapi.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Implementasi tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada unit kerja yang tertera pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan menyelenggarakan kegiatan yang mendukung dan dapat mencapai *outcome* yang tertera pada Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 2020 - 2024 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 2020 - 2024 yang kemudian akan diukur pelaksanaannya melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam pertanggungjawaban dan sebagai upaya peningkatan kinerja instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas Kinerja dilaporkan menggunakan Laporan Kinerja oleh masing-masing kementerian atau lembaga (K/L) yang telah diatur diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara rinci diatur di dalam Peraturan Menteri PUPR nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Laporan Kinerja menyajikan informasi berupa uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja, kapasitas organisasi, pengukuran capaian kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja, dan simpulan dan rekomendasi yang dapat diimplementasi sebagai peningkatan untuk kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi di tahun 2020.

RESTRUKTURISASI ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaporan pembiayaan perumahan melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha dan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan pembiayaan perumahan melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha dan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan;

- c. Penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pembiayaan primer dan pembiayaan sekunder perumahan;
- d. Pelaksanaan kerja sama pemerintah dengan badan usaha dan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi kerja sama pemerintah dengan badan usaha dan lembaga jasa keuangan di bidang perumahan;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kerja sama pemerintah dengan badan usaha dan pelaksanaan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembiayaan perumahan melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha dan pelaksanaan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan;
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 03/PRT/M/2019 terdiri atas:

- a. Subdirektorat Kerja Sama dan Pembinaan;
- b. Subdirektorat Investasi Perumahan;
- c. Subdirektorat Kemudahan dan Bantuan;
- d. Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pada tanggal 13 Mei 2020 terjadi perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang diamanatkan dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Perubahan terjadi dengan sistem kerja yang memangkas struktural dan berfokus melaksanakan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional. Selain itu, perubahan juga meleburkan Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi ke dalam Subdirektorat lain, sehingga Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi;
- b. Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi;
- c. Subdirektorat Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

PANDEMI COVID-19

Pada tahun 2020 terjadi pandemi *Coronavirus Disease - 2019* (Covid-19) yang disebabkan oleh virus korona yang menyerang pernapasan dan disebarkan melalui *droplet*. Covid-19 menyerang seluruh negara termasuk Indonesia. Kasus pertama Covid-19 di Indonesia adalah bulan Maret 2020 dan menyebabkan banyak perubahan terjadi termasuk cara bekerja dan berinteraksi sosial. Perubahan cara bekerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diatur dengan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/SE/M/2020 tentang

Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkunga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mengatur mengenai kehadiran pegawai, penyelenggaraan aktivitas perkantoran, perjalanan dinas, penyelenggaraan pelatihan, seminar, lokakarya, dan rapat, dan pengaturan penyelenggaraan pelayanan publik.

1.2. TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjalankan tugas dan fungsi, sebagai berikut:

Kedudukan

Unit kerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dipimpin oleh Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

1.3. TUGAS

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.

1.4. FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020 Pasal 570, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijaka di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
- d. Penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
- e. Pelaksanaan percepatan kerja sama pemerintah dan badan usaha di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan;
- f. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;

- g. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan; dan
- i. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

1.5. STRUKTUR ORGANISASI

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan terdiri atas:

①. Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi

Tugas Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi yaitu melaksanakan:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan;
- b. pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi;
- c. penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- f. serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan legalisasi rencana investasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.

②. Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi

Tugas Subdirektorat Kerja Sama Investasi yaitu melaksanakan:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan percepatan kerja sama pemerintah dan badan usaha;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi; serta
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan koordinasi kerja sama investasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan.

③. Subdirektorat Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan

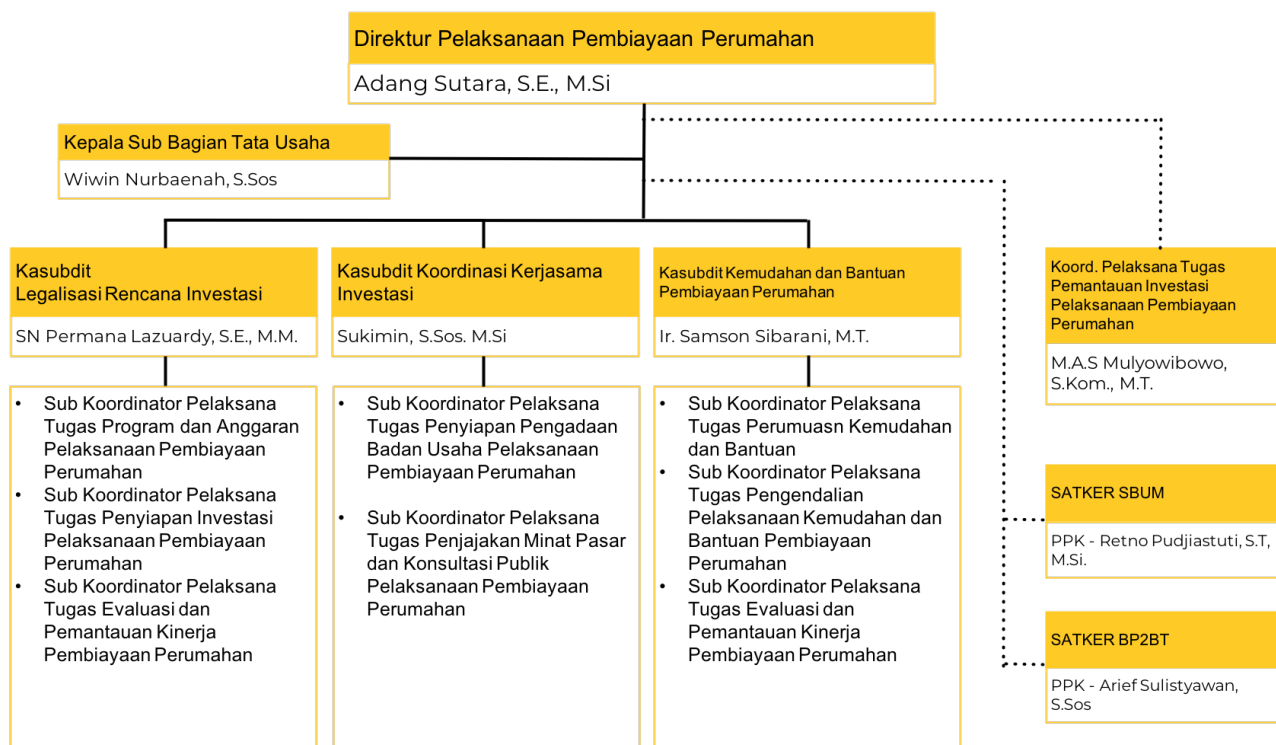
Tugas Subdirektorat Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan yaitu melaksanakan:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan;
- b. pelaksanaan, koordinasi, dan sinkronisasi;
- c. penyiapan

④. Subbagian Tata Usaha

Tugas Subbagian Tata Usaha adalah melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Bagan struktur organisasi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

1.6. ISU STRATEGIS

Isu strategis dan tantangan pembiayaan infrastruktur meliputi isu strategis yang terkait dengan penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) bidang pekerjaan umum dan perumahan, dan isu strategis yang terkait dengan bidang pembiayaan perumahan.

Isu strategis yang terkait dengan penyelenggaraan KPBU bidang pekerjaan umum dan perumahan meliputi:

- Perencanaan penyediaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan masih belum mengakomodasi pendanaan di luar skema Non APBN;
- Belum adanya kriteria proyek KPBU untuk semua sektor di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan;
- Belum efektifnya kelembagaan simpul KPBU dalam mendukung pelaksanaan KPBU;
- Keterbatasan dokumen KPBU yang memadai sehingga mempengaruhi kualitas proyek KPBU;
- Proses pelaksanaan pengadaan proyek KPBU membutuhkan waktu yang cukup lama;
- Dukungan kelayakan proyek dan penjaminan Pemerintah untuk proyek KPBU terbatas untuk mendanai seluruh proyek KPBU;
- Proyek KPBU mayoritas diikuti dan dilaksanakan oleh BUMN;
- Masih rendahnya komitmen Pemerintah Daerah sebagai PJPB;
- Ketersediaan lahan yang *clear and clean* untuk proyek KPBU.

Isu strategis bidang pembiayaan perumahan meliputi:

- Akses MBR terutama sektor informal masih terbatas terhadap pembiayaan perumahan;

- b. Pengembangan sistem pembiayaan perumahan belum terintegrasi;
- c. Skema bantuan dan/kemudahan perolehan rumah yang ada belum sesuai dengan profil dan karakteristik MBR;
- d. Kenaikan harga lahan dan rumah tidak sesuai dengan daya beli MBR;
- e. Kualitas bangunan rumah bersubsidi masih ada yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Masih besarnya gap pembiayaan antara kebutuhan pembiayaan dan ketersediaan dana jangka Panjang;
- g. *Supply stock* rumah bersubsidi belum sesuai dengan kebutuhan MBR;
- h. Tingginya laju urbanisasi tidak diikuti dengan penyediaan rumah yang terjangkau dan layak huni, sehingga menimbulkan permukiman kumuh.

BAB

2

PERENCANAAN KINERJA

Bab ini merupakan penjelasan mengenai Pagu, Rencana Anggaran, serta Capaian Realisasi Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

2.1. URAIAN SINGKAT RENSTRA

2.1.1. TUJUAN

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menetapkan beberapa tujuan Kementerian dalam 2020 - 2024 yang terdiri dari:

1. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestic, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industry dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko / kerentanan bencana alam.
2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan sistem logistic nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing.
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya *smart living*, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4. Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan professional.
5. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih, dan terpercaya yang didukung oleh SDM aparatur yang berkinerja tinggi.

Tujuan Unit Organisasi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tahun 2020 - 2024, yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan dan Percepatan Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan melalui pembiayaan kreatif dan inovatif;
2. Peningkatan Akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah dalam pemenuhan kebutuhan rumah layak huni melalui bantuan dan fasilitasi pembiayaan perumahan.

Adapun tujuan bidang pelaksanaan pembiayaan perumahan tahun 2020 - 2024 adalah untuk meningkatkan daya beli dan aksesibilitas MBR ke lembaga-lembaga pembiayaan perumahan yang didukung sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel.

2.1.2. SASARAN STRATEGIS

5 (lima) Sasaran Strategi Kementerian PUPR yaitu:

1. Sasaran Strategis pertama (SS-1), yakni: Meningkatnya Ketersediaan Air Melalui Infrastruktur Sumber Daya Air.
2. Sasaran Strategis kedua (SS-2), yakni: Meningkatnya Konektivitas Jaringan Jalan Nasional.
3. Sasaran Strategis ketiga (SS-3), yakni: Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan Dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak.

4. Sasaran Strategis keempat (SS-4), yakni: Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan SDM Vokasional Bidang Konstruksi Yang Kompeten Dan Professional.
5. Sasaran Strategis kelima (SS-5), yakni: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya.

Berdasarkan Sasaran Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan mendukung Sasaran Strategis Kementerian PUPR, yaitu:

- a. Sasaran Strategis ketiga (SS-3), yakni meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman, dan Terjangkau, dengan Indikator Kinerja kedua yaitu Presentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni.
- b. Sasaran Strategis kelima (SS-5), yakni: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya dengan Indikator Kinerja kedua yaitu Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Didukung Sistem, Kebijakan, dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif.

2.1.3. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan regulasi dan kebijakan teknis dalam rangka mendukung pelaksanaan pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan;
2. Peningkatan keterpaduan pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan terhadap pusat - pusat kegiatan, pusat pertumbuhan ekonomi, dan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS);
3. Penataan dan peningkatan peran Simpul KPBU dalam pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan;
4. Peningkatan kontribusi dan manfaat pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan dalam rangka mendukung pencapaian Visum PUPR 2020 - 2024;
5. Percepatan proses perencanaan dan penyiapan KPBU;
6. Percepatan proses pengadaan KPBU;
7. Pengembangan skema pembiayaan KPBU;
8. Membentuk unit pelaksana teknis / memanfaatkan unit kerja eksisting yang berfungsi sebagai *paying agent* serta fungsi lainnya yang terkait dengan pengelolaan anggaran dan pemberian pelayanan kepada masyarakat;
9. Pengembangan skema pembiayaan perumahan yang lebih terjangkau, efisien, dan akuntabel;
10. Peningkatan penerbitan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan baik untuk pemilikan rumah tapak dan rumah susun serta pembangunan dan peningkatan kualitas rumah swadaya;
11. Peningkatan peran perbankan yang lebih besar dalam menunjang pembiayaan perumahan;
12. Peningkatan peran lembaga pembiayaan sekunder baik melalui peningkatan nilai sekuritisasi aset, penerbitan obligasi, dan pemberian pinjaman (*refinancing*);

13. Percepatan operasionalisasi BP Tapera; dan
14. Mendorong peran serta Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembiayaan perumahan, melalui sosialisasi, fasilitasi, dan advokasi.

2.1.4. STRATEGI

Arah kebijakan dalam pembangunan perumahan dan permukiman berdasarkan RPJMN 2020 - 2024 adalah meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak dana man yang terjangkau untuk mewujudkan kota yang inklusif dan layak huni. Strategi yang diterapkan oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan difokuskan pada 3 (tiga) aspek, yakni sisi permintaan (*demand side*), sisi pasokan (*supply side*), dan lingkungan yang mendukung (*enabling environment*). Strateginya adalah sebagai berikut:

1. Sisi Permintaan (*Demand Side*)
 - a. Pemantapan sistem pembiayaan primer dan sekunder perumahan termasuk optimalisasi pemanfaatan sumber pembiayaan jangka panjang seperti Tabungan dan Asuransi Pensiun (TASPEN) dan BPJ Ketenagakerjaan;
 - b. Reformasi subsidi perumahan yang lebih efisien dan tepat sasaran;
 - c. Perluasan fasilitas pembiayaan perumahan terutama bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap dan membangun rumahnya secara swadaya;
 - d. Pengembangan layanan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk memperluas akses pembiayaan perumahan.
2. Sisi Pasokan (*Supply Side*);
 - a. Peningkatan penyediaan perumahan yang sesuai dengan tata ruang dengan terpadu dengan layanan infrastruktur dasar permukiman, termasuk sistem transportasi publik;
 - b. Pengembangan sistem perumahan publik berbasis rumah susun di perkotaan;
 - c. Peremajaan kota secara inklusif dan konsolidasi tanah dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh;
 - d. Pemanfaatan tanah milik negara / BUMN untuk mendukung penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah;
 - e. Pengembangan peran dunia usaha termasuk BUMN/BUMD dalam penyediaan perumahan, yaitu Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas), PT. Sarana Multigriya Finansial (PT. SMF), dan Bank Tabungan Negara (BTN).
3. *Enabling Environment*,
 - a. Penguatan implementasi standar keandalan dan tertib bangunan, kemudahan perizinan dan administrasi pertanahan, serta pengembangan teknologi dan bahan bangunan murah;
 - b. Peningkatan kapasitas pemerintah/pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan;
 - c. Peningkatan kolaborasi antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan;

- d. Pengembangan sistem intensif dan disinsentif dalam penyediaan perumahan;
- e. Pengembangan Badan Layanan Umum (BLU) Perumahan Nasional dan daerah.

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka pemenuhan perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau di perkotaan adalah mengembangkan sistem perumahan publik melalui penyediaan rumah susun sederhana sewa dan rumah susun sederhana milik yang terintegrasi dengan sistem transportasi publik, dengan pendekatan membentuk badan perumahan publik perkotaan di metropolitan terkait dengan penyediaan tanah, pengelolaan aset, dan permukiman kawasan termasuk pengembangan kota baru (*new town*).

2.1.5. PROGRAM TEKNIS

Untuk mencapai apa yang telah tertuang dalam pernyataan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian PUPR, ditetapkan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan menjalankan 3 (tiga) Sasaran Program **Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya dan Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman**.

Terdapat 2 (dua) Sasaran Kegiatan pada **Sasaran Program Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya** yang terkait dengan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, yaitu:

- I. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK) yaitu Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan.
- II. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan IKK yaitu Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja yang dilaksanakan oleh Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan telah mengalami 2 (dua) kali perubahan. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 pertama dilakukan oleh Direktur Pembiayaan Perumahan yang ditandatangani pada bulan Januari 2020 dengan sasaran, indikator, dan target sebagai berikut:

Tabel 1. Target Kinerja Perjanjian Kinerja Pertama

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Program: Penyelenggaraan dan Pembinaan Pembiayaan Perumahan			
1	Terlaksananya Penyelenggaraan dan	1) Perencanaan Kerja Sama dan Pembinaan Pembiayaan Perumahan	2 Jakstra

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	Pembinaan Pembiayaan Perumahan	2) Pelaksanaan Investasi Perumahan	1 Paket Pembiayaan
		3) Perumusan Kebijakan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan	3 Draft NSPK
		4) Pemantauan dan Evaluasi Investasi Perumahan serta Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan	6 Laporan
		5) Layanan Bantuan Pembiayaan Perumahan	312 Rumah Tangga
		6) Layanan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan	8.460 Rumah Tangga
		7) Layanan Perkantoran	1 Layanan

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 kembali dilakukan oleh Plt. Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan pada bulan Oktober 2020 setelah terbitnya Peraturan Menteri PUPR Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 - 2024. Isi Perjanjian Kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Target Kinerja Perjanjian Kinerja Kedua (Revisi ke-1)

Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Indikator	Baseline 2019	Target
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	48,83%	100%
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan		
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan	0%	25%
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	50,40%	55,92%
SK. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		
IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2%	2%
SP. Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman		
IKSP. Tingkat pemenuhan aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang Mendapat Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	71,44%	100%
SK. Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan		
IKK. Tingkat Pencapaian Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	42%	50%

Pada Bulan Desember 2020, terdapat Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2020 setelah penetapan Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Noor 1793 / KPTS / M / 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tidak terdapat perubahan Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, dan Indikator serta target pada revisi kedua, sehingga Perjanjian Kinerja antara Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah sebagai berikut:

Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Indikator	Baseline 2019	Target
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	48,83%	100%
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan		
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan	0%	25%
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	50,40%	55,92%
SK. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		
IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2%	2%
SP. Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman		
IKSP. Tingkat pemenuhan aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang Mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	71,44%	100%
SK. Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan		
IKK. Tingkat Pencapaian Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	42%	50%

2.3. METODE PENGUKURAN

Metode pengukuran yang digunakan pada perhitungan capaian kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan tertera di dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 2020 - 2024 berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 - 2024 sebagai berikut:

Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Komposit Indikator Kinerja	Metode Perhitungan	Bobot
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya						
SK 01	Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2%	Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantorat Direktorat	Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantorat Direktorat	100%
SK 03	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan	25%	Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan Paket Investasi Pembiayaan Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penyiapan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target	50%
				Tingkat implementasi kegiatan transaksi Paket Investasi Pembiayaan Perumahan	Jumlah Proyek KPBU Perumahan yang siap dikerjasamakan dibandingkan dengan target	50%
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
SP. Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman						
SK 01	Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan	Tingkat Pencapaian Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	50%	Prosentase Rumah Tangga yang Mendapat Fasilitas Pembiayaan Perumahan Melalui Sumber Pembiayaan Primer, Sumber Pembiayaan Sekunder dan Tapera	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapat Fasilitas Pembiayaan Perumahan melalui Sumber Pembiayaan Primer, Sumber Pembiayaan Sekunder dan Tapera dibandingkan dengan target	30%

Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Komposit Indikator Kinerja	Metode Perhitungan	Bobot
				Prosentase Rumah Tangga yang mendapat Bantuan Pembiayaan Perumahan	Jumlah Rumah Tangga yang mendapat Bantuan Pembiayaan Perumahan dibandingkan dengan target	50%
				Tingkat implementasi penyusunan kebijakan bantuan Pembiayaan Perumahan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan dan NSPK Bantuan Pembiayaan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target	20%

2.4. TARGET 2020 BERDASARKAN RENCANA STRATEGIS

Target yang harus dicapai Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan pada Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan dan dibandingkan dengan *baseline* atau dengan dasar capaian pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Indikator	Baseline 2019	Target
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan		
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan	0%	25%
SK. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		
IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2%	2%
SP. Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman		
SK. Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan		
IKK. Tingkat Pencapaian Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	42%	50%

BAB

3

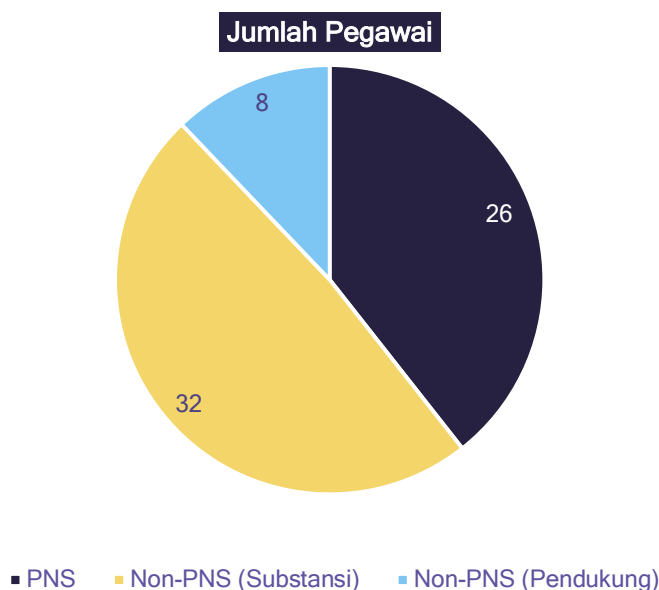
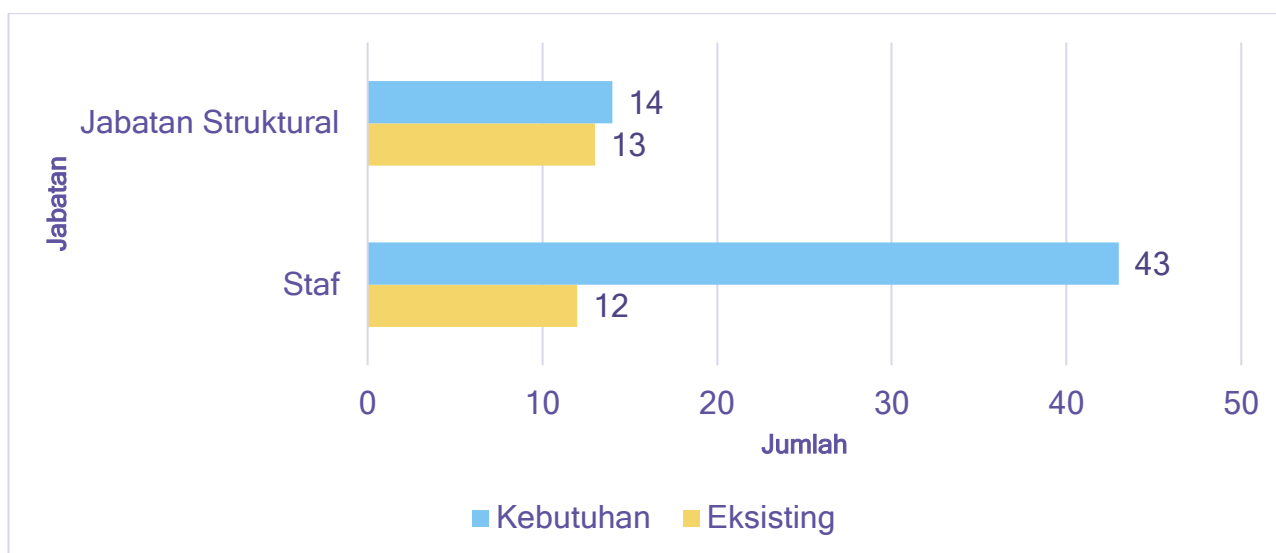
KAPASITAS ORGANISASI

Bab ini menguraikan pertanggungjawaban seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan mencakup Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana, dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Bab ini juga menjelaskan potensi dan hambatan yang dihadapi karena faktor sumber daya yang dimiliki.

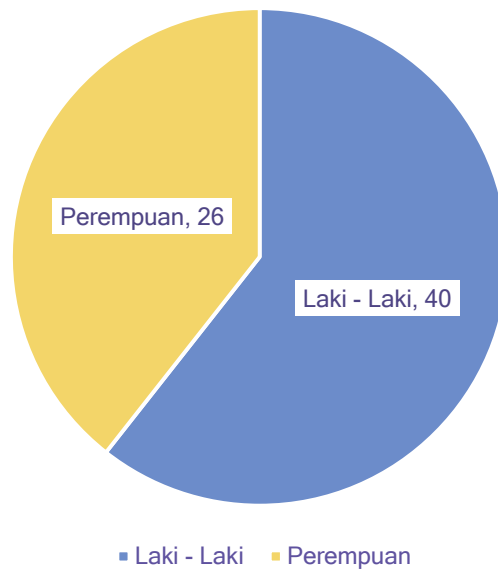
BAB 3 KAPASITAS ORGANISASI

3.1. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu faktor yang berperan dalam kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. Jumlah SDM turut mempengaruhi tercapainya kinerja yang telah direncanakan. Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan berdasarkan Analisis Beban Kerja adalah sebanyak 57 orang dengan komposisi 14 jabatan struktural dan 43 staf, saat ini hanya terisi 13 jabatan struktural, 6 staf PNS, dan 6 staf CPNS, sehingga kekurangan 1 orang untuk mengisi jabatan struktural dan 31 orang untuk mengisi kekurangan staf di Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan. Kekosongan 1 (satu) pejabat struktural dikarenakan masa purnabakti yang bersangkutan pada Bulan Oktober 2019.

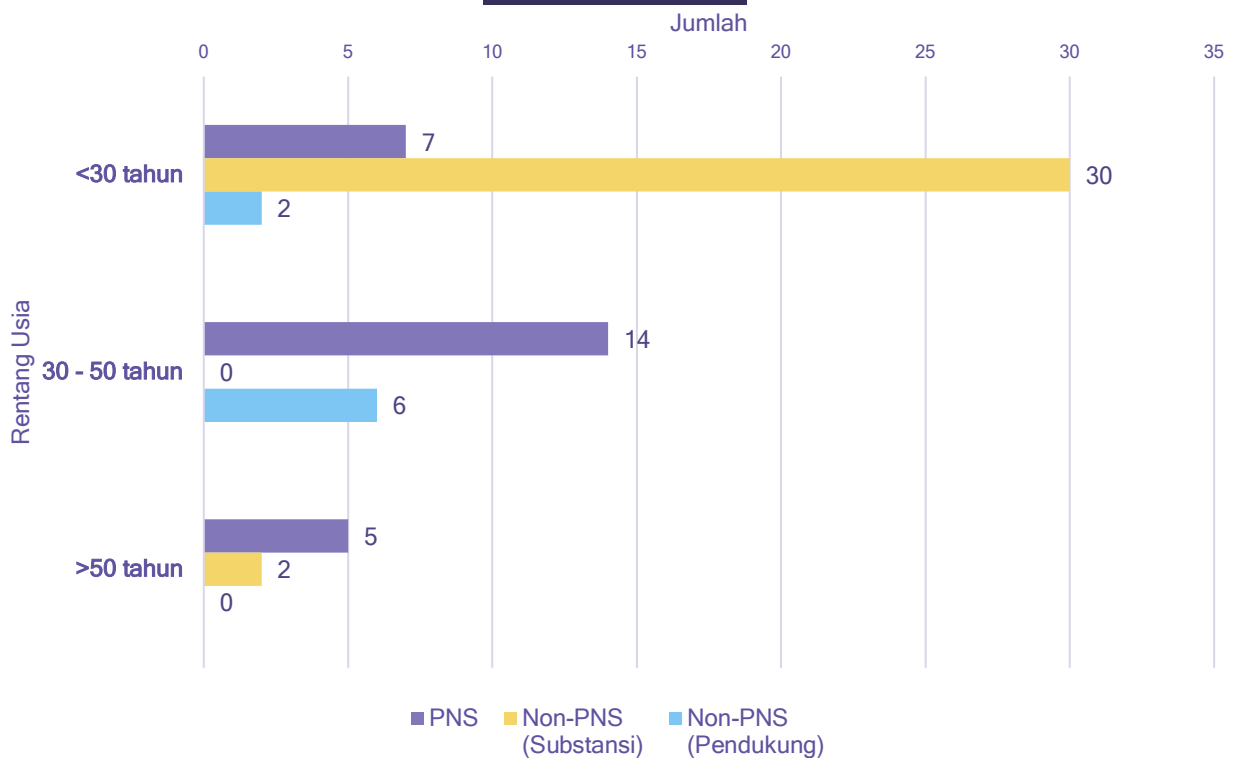


SDM Menurut Jenis Kelamin

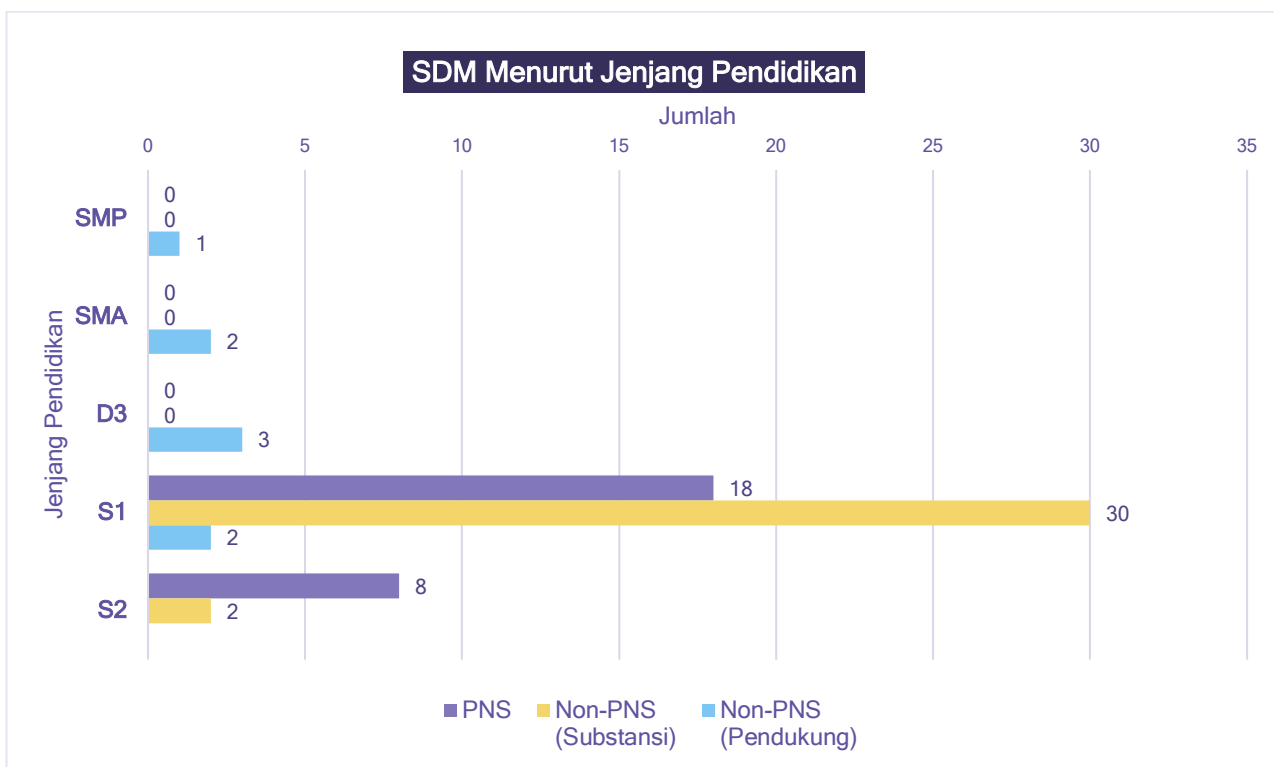


■ Laki - Laki ■ Perempuan

SDM Menurut Usia



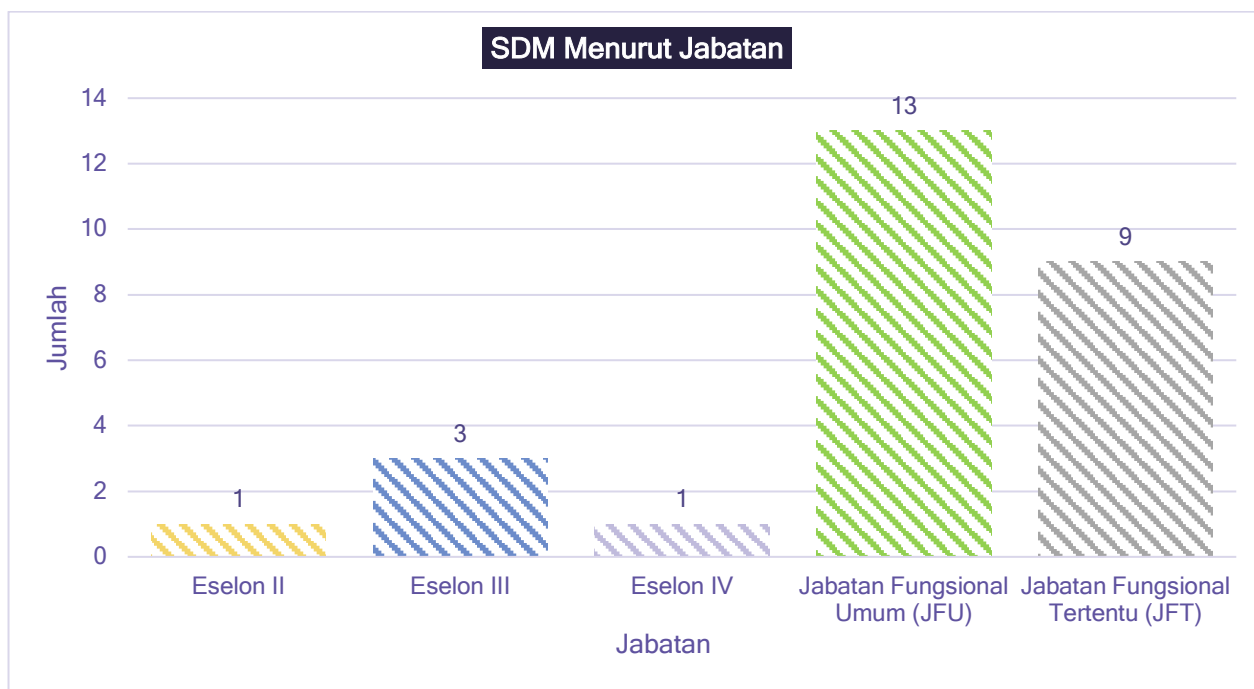
Pegawai Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan saat ini sebanyak 66 orang dengan komposisi 26 orang PNS, 32 orang Non-PNS (Substansi), dan 8 orang Non-PNS (pendukung / honorer). Sebanyak 26 orang adalah wanita dan 40 orang adalah pria dengan rentang usia <30 tahun sebanyak 39 orang, 30 - 50 tahun sebanyak 20 orang, dan >50 tahun sebanyak 7 orang.



Tingkat pendidikan pegawai Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan terdiri dari lulusan SMP sebanyak 1 orang, SMA sebanyak 2 orang, D3 sebanyak 3 orang, S1 sebanyak 50 orang, dan tingkat pendidikan S2 sebanyak 10 orang.



Komposisi golongan ASN di Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan adalah sebanyak 7 orang memiliki golongan III/a, sebanyak 3 orang dengan golongan III/b, 6 orang dengan golongan III/c, 5 orang dengan golongan III/d, sebanyak 1 orang memiliki golongan IV/a, 4 orang memiliki golongan IV/b, dan 1 orang memiliki golongan IV/c.



Komposisi SDM Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan menurut jabatan adalah terdiri dari 1 orang Eselon II, 3 orang Eselon III, 1 orang Eselon IV, 13 orang memiliki Jabatan Fungsional Umum, dan 9 orang memiliki Jabatan Fungsional Tertentu. Jenis Jabatan Fungsional pegawai di Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan adalah sebagai berikut:

1. Analis Kebijakan
2. Perencana
3. Penelaah Keuangan
4. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan
5. Perancang Peraturan Perundang-undangan

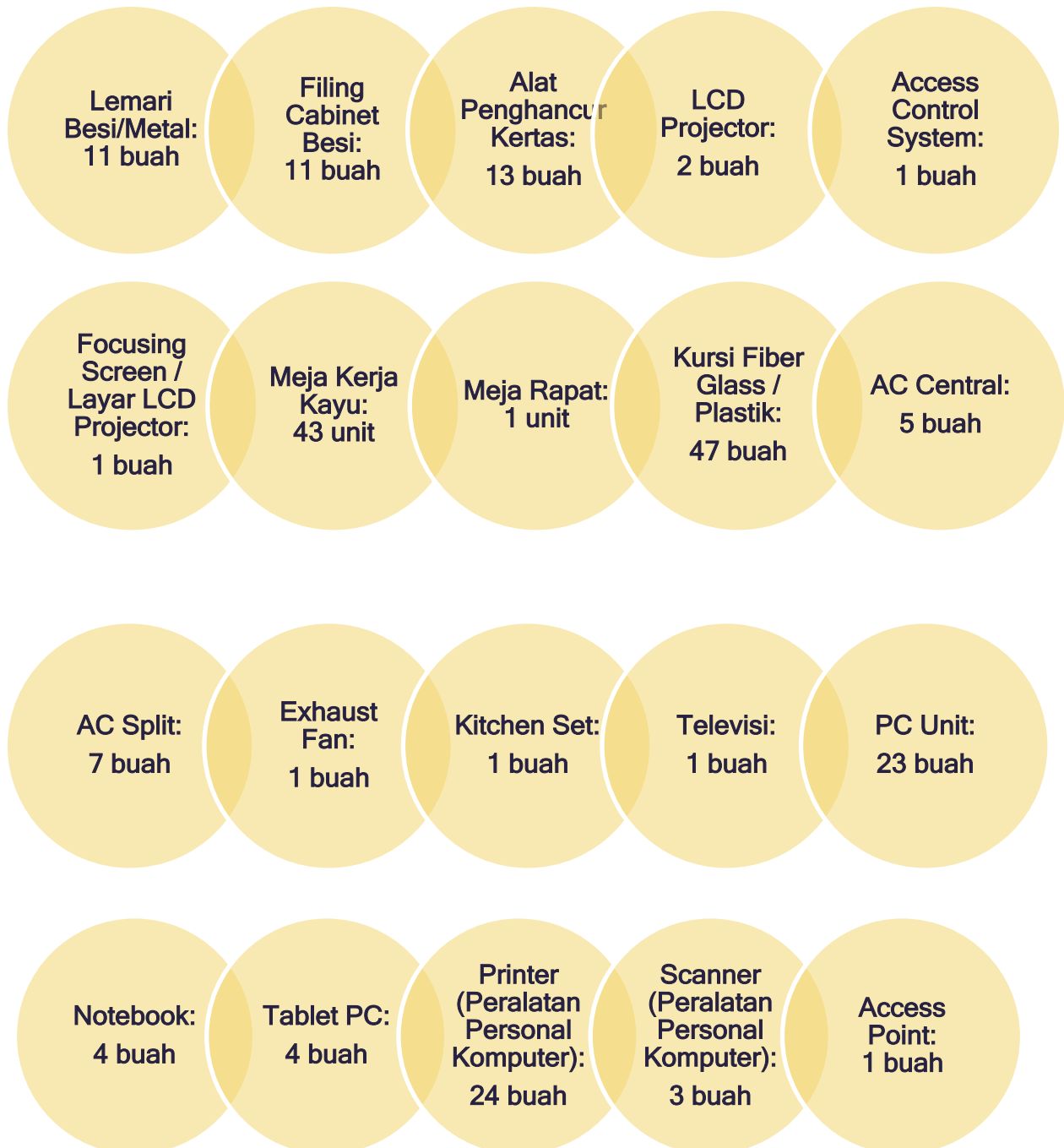
3.2. PENINGKATAN KAPASITAS DAN KUALITAS SDM

Pada tahun 2020, sebanyak 27 ASN (PNS dan CPNS) Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan. Jenis Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti selama 2019 oleh pegawai Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan adalah sebagai berikut:

1. Diklat Kepemimpinan II;
2. Diklat Kepemimpinan IV;
3. Diklat Pelaksanaan Anggaran;
4. Diklat Sertifikasi APMG;
5. Diklat Pengelolaan BMN;
6. Diklat KPBU;
7. Diklat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri;
8. Magang Pelaksanaan KPBU di Bappenas.

3.3. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana merupakan alat penunjang keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi. Apa bila sarana dan prasarana tidak tersedia dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi tersebut, maka seluruh kegiatan yang dilakukan tidak bisa mencapai hasil yang diharapkan. Data berikut adalah sarana dan prasarana yang tersedia di Direktorat Pembiayaan Perumahan selama tahun 2020.



Gambar 2. Inventaris Sarana dan Prasarana Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

3.4. DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)

DIPA Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan terdiri dari BA.033 dan BA.999.07. DIPA Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dengan Nomor SP DIPA-033.16.1.631003/2020 mengalami perubahan pagu sebanyak 2 kali. Penerbitan DIPA pertama pada tanggal 12 November 2019 dengan besar pagu **Rp 38.600.000.000,00** dan sebesar Rp 15.000.000.000,00 merupakan dana Pinjaman / Hibah Luar Negeri (PHLN) yang diperuntukan untuk Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT). Kemudian, pagu BA.033 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan mengalami perubahan pada Revisi 02 DIPA pada tanggal 27 April 2020 dengan pagu **Rp 33.913.541.000,00**. Tanggal 11 Juni 2020, pada Revisi 03 DIPA BA.033, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan mengalami penambahan yang berasal dari dana PHLN, sehingga pagu yang dimiliki oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan pada tahun 2020 adalah sebesar **Rp 414.913.541.000,00**.

BA.999.07 terdiri dari Subsidi Bunga Kredit Perumahan dengan anggaran sebesar Rp 4.657.982.299.000,00 dengan target 904.694 unit dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan sebesar Rp 1.064.000.000.000,00 dengan target 263.000 unit.

Indikator Kinerja Kegiatan di dalam DIPA Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan berbeda dengan Indikator Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan yang tertera di dalam Rencana Strategis Kementerian PUPR. Indikator Kinerja yang tertera di dalam Rencana Strategis berorientasi *outcome* sedangkan pada DIPA berorientasi *Output Kegiatan*. Sehingga hubungan Indikator Kinerja dalam Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Kegiatan di dalam DIPA adalah sebagai berikut:

Program	Sasaran Strategis	Sasaran Program (SP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Output Kegiatan (DIPA)	Indikator Output Kegiatan (DIPA)
Dukungan Manajemen	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan	Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan
						Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Investasi Pembiayaan Perumahan
					Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan	Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan
					Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pra Studi
						Jumlah Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan

Program	Sasaran Strategis	Sasaran Program (SP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Output Kegiatan (DIPA)	Indikator Output Kegiatan (DIPA)
					Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan	Jumlah Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan
					NSPK Investasi Pembiayaan Perumahan	Jumlah Perumusan NSPK Investasi Pembiayaan Perumahan
					Proyek KPBU Perumahan yang Siap Dikerjakan	Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Perumahan
						Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Perumahan
					Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan
					Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

Program	Sasaran Strategis	Sasaran Program (SP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Output Kegiatan (DIPA)	Indikator Output Kegiatan (DIPA)
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	SP. Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Layanan Perkantoran	Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat PPP
Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman, dan Terjangkau	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman	Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	Fasilitas Pembiayaan Perumahan	Jumlah Pelaksanaan Fasilitas Pembiayaan Perumahan: SMF (Dana Masyarakat)
						Jumlah Pelaksanaan Fasilitas Pembiayaan Perumahan: Tapera (Dana Masyarakat)
					Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	Jumlah Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan
					Fasilitas Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka	Jumlah Pelaksanaan Fasilitas Subsidi Selisih Bunga dan

Program	Sasaran Strategis	Sasaran Program (SP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Output Kegiatan (DIPA)	Indikator Output Kegiatan (DIPA)
						Bantuan Uang Muka: SSB (BA.999.07)
						Jumlah Pelaksanaan Fasilitas Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka: SBUM (BA.999.07)
					Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan	Jumlah Perumusan Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan
						Jumlah Penyusunan dan Penyiapan Penandatanganan Kerja Sama Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan

Program	Sasaran Strategis	Sasaran Program (SP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Output Kegiatan (DIPA)	Indikator Output Kegiatan (DIPA)
						Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan
					NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan	Jumlah Perumusan NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan
					Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan
					Fasilitasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan

BAB

4

AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang dicapai oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan pada tahun 2020.

BAB 4 AKUNTABILITAS KINERJA

4.1. CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai untuk melakukan pengelolaan kegiatan yang akuntabel memanfaatkan sumber daya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan prinsip yang harus diperhatikan dalam menerapkan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah. Akuntabilitas diharapkan dapat menunjukkan tingkat pencapaian sasaran secara jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dilakukan berdasarkan Metode Perhitungan yang terdapat di dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020 - 2024 dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja berdasarkan target pada Rencana Strategis dengan kinerja yang telah dicapai Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan.

Pada Perjanjian Kinerja, target kinerja yang harus dicapai oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan merupakan Sasaran Kegiatan, yaitu:

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan dengan Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan dengan target 2020 sebesar 25%;
2. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan target pada tahun 2020 sebesar 2%;
3. Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan dengan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan dengan target capaian pada tahun 2020 sebesar 50%.

Cascading atau turunan antara Program, Sasaran Program, Sasran Kegiatan, Indikator, Output Kegiatan, dan Paket Kegiatan adalah sebagai berikut:

Program	Sasaran Strategis	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Output Kegiatan	Indikator Output Kegiatan	Paket Kegiatan	Target Pada Renstra
Dukungan Manajemen	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan	Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	Penyusunan Program dan Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	1
						Pembiayaan Perumahan	Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Investasi Pembiayaan Perumahan	Penyusunan Identifikasi Potensi Proyek KPBU Bidang Perumahan	1
						Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan	Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan	Studi Pendahuluan Proyek KPBU Rumah Susun Pekerja atau Aparatur Sipil Negara (ASN)	1
								Studi Pendahuluan Proyek KPBU Rumah Susun TOD	
						Pra-Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pra Studi	OBC	2
							Jumlah Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	FBC	1
						Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan	Jumlah Penyiapan Dukungan Kerja Sama	Pemetaan Peran Pemangku Kepentingan dalam Sistem	2

Program	Sasaran Strategis	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Output Kegiatan	Indikator Output Kegiatan	Paket Kegiatan	Target Pada Renstra
						Investasi Pembiayaan Perumahan	Investasi Pembiayaan Perumahan	Pembiayaan Perumahan di Indonesia	
								Pengembangan Skema Pembiayaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha	
						NSPK Investasi Pembiayaan Perumahan	Jumlah Perumusan NSPK Investasi Pembiayaan Perumahan	-	0
						Proyek KPBU Perumahan yang Siap Dikerjakan	Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Perumahan	Penyusunan/Penyiapan Fasilitas e-Building Management untuk Mengukur Pencapaian Persyaratan Pemenuhan Availability Paymen (Service Level Agreement)	3
								Penyusunan Kriteria Penentuan Badan Usaha Pelaksana Proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Bidang Perumahan	
								Penyusunan Dokumen Pendukung Kegiatan	

Program	Sasaran Strategis	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Output Kegiatan	Indikator Output Kegiatan	Paket Kegiatan	Target Pada Renstra
								Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Bidang Perumahan	
							Jumah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Perumahan	N/A	1
						Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan	Penyiapan Model Pembinaan Teknis Pemantauan dan Supervisi KPBU Perumahan	1
						Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	1
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan	SP. Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan Pembiayaan	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas,	Layanan Perkantoran	Jumlah Layanan Pelaksanaan Oprasionalisasi Perkantoran Direktorat PPP	Operasional Direktorat	1

Program	Sasaran Strategis	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Output Kegiatan	Indikator Output Kegiatan	Paket Kegiatan	Target Pada Renstra
	Tugas Teknis Lainnya	Teknis Lainnya		Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				
Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman, dan Terjangkau	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman	Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	Fasilitas Pembiayaan Perumahan	Jumlah Pelaksanaan Fasilitas Pembiayaan Perumahan: SMF (Dana Masyarakat)	Dukungan Pembiayaan Perumahan Melalui Sumber Pembiayaan Sekunder Perumahan dan Tabungan Perumahan Rakyat (SMF)	8.460
							Jumlah Pelaksanaan Fasilitas Pembiayaan Perumahan: Tapera (Dana Masyarakat)	Dukungan Pembiayaan Perumahan Melalui Sumber Pembiayaan Sekunder Perumahan dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)	50.000

Program	Sasaran Strategis	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Output Kegiatan	Indikator Output Kegiatan	Paket Kegiatan	Target Pada Renstra
						Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	Jumlah Penyaluran Bantuyuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	Pelaksanaan Penyaluran Program BP2BT	2.150
						Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka: SSB (BA.999.07)	SSB	175.000
							Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka: SBUM (BA.999.07)	SBUM	263.000
						Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan	Jumah Perumusan Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayan Perumahan	Pengembangan dan Penyempurnaan Skema Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Rumah Umum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	3
								Pengembangan dan Penyempurnaan Skema Kemudahan dan/atau	

Program	Sasaran Strategis	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Output Kegiatan	Indikator Output Kegiatan	Paket Kegiatan	Target Pada Renstra
								Bantuan Pembiayaan Rumah Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	
								Penghitungan Harga Rumah Bersubsidi Tahun 2021	
							Jumlah Penyusunan dan Penandatanganan Kerja Sama Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan	Pelaksanaan Fasilitas Koordinasi, Sinkronisasi Kebijakan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan	1
						NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	-	0
							Jumlah Perumusan NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan	Pemberdayaan Pelaku Pembangunan Rumah Bersubsidi	1

Program	Sasaran Strategis	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Output Kegiatan	Indikator Output Kegiatan	Paket Kegiatan	Target Pada Renstra
						Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	Strategi Pelibatan Pemerintah Daerah dalam Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan/Bantuan Pembiayaan Perumahan	4
								Penatalaksanaan Monitoring dan Evaluasi Bantuan/Kemudahan Pembiayaan Perumahan dengan Geo-Enables Monitoring and Supervision (GEMS)	
								Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Wilayah 1	
								Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Wilayah 2	
						Fasilitasi Bantuan Pembiayaan Perumahan	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	Dana Operasional untuk Mendukung Pelaksanaan Penyaluran Dana Subsidi Bunga Kredit Perumahan	1

Program	Sasaran Strategis	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Output Kegiatan	Indikator Output Kegiatan	Paket Kegiatan	Target Pada Renstra
						Berbasis Tabungan		dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	
								Operasional PHLN	
								Pendampingan Program Pelaksanaan Penyaluran Program BP2BT	
								Penyiapan Tata Kelola Pengawasan, Pengendalian, dan Penanganan Pengaduan Program BP2BT	
								Pengembangan Kapasitas untuk Pembiayaan kepada Kelompok Penghasilan Tidak Tetap	

Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan Indikator Kinerja yaitu Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan yaitu 24,25% dari target sebesar 25%. Capaian Kinerja Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan Indikator Kinerja yaitu Tingkat Kualitas dan Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah 2% dari target 2%. Capaian Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan dengan Indikator Kegiatan Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan adalah sebesar 42,06% dari target sebesar 50%.

Sasaran Strategis	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja SP (IKSP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Capaian
Program Dukungan Manajemen						
Meningkatnya Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan, dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan	25%	24,25%
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata Kelola penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan	2%	2%

Sasaran Strategis	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja SP (IKSP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Capaian
				Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman						
Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman, dan Terjangkau	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman	Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	50%	42,06%

Berikut adalah uraian capaian kinerja Sasaran Kegiatan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun Anggaran 2020 pada Program Dukungan Manajemen beserta indikator yang tertera di dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja:

1) Sasaran Kegiatan Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Sasaran kegiatan ini memiliki Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan dengan target 25%. Berdasarkan Rencana Strategis, terdapat 2 (dua) jenis indikator yaitu:

- ①. Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan Paket Investasi Pembiayaan Perumahan dengan bobot perhitungan 50% dan memiliki output kegiatan kegiatan sebagai berikut:
 - i. Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan dengan bobot perhitungan 15%;
 - ii. Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan dengan bobot perhitungan 20%;
 - iii. Pra-Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan dengan bobot perhitungan 30%;
 - iv. Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan dengan bobot perhitungan 20%;
 - v. NSPK Investasi Pembiayaan Perumahan dengan bobot perhitungan 15%.
- ②. Tingkat implementasi kegiatan transaksi Paket Investasi Pembiayaan Perumahan dengan bobot perhitungan 50% dan memiliki output kegiatan kegiatan sebagai berikut:

- i. Proyek KPBU Perumahan yang Siap Dikerjakan dengan bobot perhitungan 35%;
- ii. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman dengan bobot perhitungan 35%;
- iii. Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman dengan bobot perhitungan 30%.

Capaian masing - masing output kegiatan dan paket kegiatan dari masing - masing output adalah sebagai berikut:

Program Dukungan Manajemen							
Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya							
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan							
Target				Capaian			
25,00%				24,25%			
No	Jenis Indikator / Output Kegiatan / Indikator Output Kegiatan / Paket Kegiatan/Capaian Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Realisasi (%)	Bobot (%)	Capaian (%)
	Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan Paket Investasi Pembiayaan Perumahan	%	100%	108%	108%	50%	54%
A	Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	Rekom. Kebijakan	2	2	100%	15%	15%
	Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan						
1	Penyusunan Program dan Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	Kebijakan	1	1	100%	50%	50%
	Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPBUI Investasi Pembiayaan Perumahan						
2	Penyusunan Identifikasi Potensi Proyek KPBUI Bidang Perumahan	Kebijakan	1	1	100%	50%	50%
B	Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan	Rekom. Kebijakan	1	2	200%	20%	40%
	Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan						
1	Studi Pendahuluan Proyek KPBUI Rumah Susun Pekerja atau Aparatur Sipil Negara (ASN)	Kebijakan	1	1	100%	50%	50%
2	Studi Pendahuluan Proyek KPBUI Rumah Susun TOD	Kebijakan	1	1	100%	50%	50%
C	Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	Rekom. Kebijakan	3	3	60%	30%	18%
	Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Investasi Pembiayaan Perumahan						

1	Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan (<i>Outline Business Case / OBC</i>)	Kebijakan	2	3	150%	40%	60%
	Jumlah Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan						
2	Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan (<i>Final Business Case / FBC</i>)	Kebijakan	1	0	0%	60%	0%
D	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan	Rekom. Kebijakan	2	2	100%	20%	20%
	Jumlah Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan						
1	Pemetaan Peran Pemangku Kepentingan dalam Sistem Pembiayaan Perumahan di Indonesia	Kebijakan	1	1	100%	50%	100%
2	Pengembangan Skema Pembiayaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha	Kebijakan	1	1	100%	50%	100%
E	NSPK Investasi Pembiayaan Perumahan	Rekom. Kebijakan	0	0	100%	15%	15%
Tingkat implementasi kegiatan transaksi Paket Investasi Pembiayaan Perumahan		%	100%	86%	86%	50%	43%
A	Proyek KPBU Perumahan yang Siap Dikerjakan	Kesepa- katan	100%	60%	60%	35%	21%
	Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Perumahan						
1	Penyusunan Penyiapan Fasilitas <i>e-Building Management</i> untuk Mengukur Pencapaian Persyaratam Pemenuhan <i>Availability Payment (Service Level Agreement)</i>	Paket	1	1	100%	60%	100%
2	Penyusunan Kriteria Penentuan Badan Usaha Pelaksana Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Bidang Perumahan	Paket	1	1	100%		
3	Penyusunan Dokumen Pendukung KEgiatan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Bidang Perumahan	Paket	1	1	100%		
	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Perumahan						
4	Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Perumahan	Kesepa- katan	1	0	0%	40%	0%
B	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Laporan	1	1	100%	35%	35%
	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan						
1	Penyiapan Model Teknis Pemantauan dan Supervisi KPBU Perumahan	Laporan	1	1	100%	35%	35%

C	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	Laporan	1	1	100%	30%	30%
	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan						
1	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	Laporan	1	1	100%	30%	100%

1.1. Penyusunan Program dan Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

Kegiatan Penyusunan Program dan Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk menjabarkan Rencana Strategis Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun 2020 - 2024, pelaksanaan kegiatan tahun 2020 serta rencana kegiatan tahun 2021 ke dalam rencana rinci dan spesifik masing - masing kegiatan pada 1 (satu) tahun anggaran 2020 dan 2021. Tujuan kegiatan in adalah Menyusun rencana kerja Direktorat PPP tahun anggaran 2021 yang meliputi tahapan kegiatan per tahun, target capaian/hasil yang diharapkan, pelaksana dan penanggung jawab kegiatan, dukungan yang dibutuhkan, dan kebutuhan anggaran.

Keluaran dari kegiatan ini adalah dokumen Strategi Program dan Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan yang memuat di dalamnya adalah gambaran umum pelaksanaan pembiayaan perumahan, Rencana Strategis Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun 2020 - 2024, reviu pelaksanaan kegiatan Direktorat PPP Tahun Anggaran 2020, dan Rencana Kerja Kegiatan Tahun Anggaran 2021.

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat beberapa kendala, yaitu:

No	Kendala	Tindak Lanjut
1	Terdapat perubahan Struktur, Organisasi, dan Tata Kerja sehingga perlu perubahan dalam perencanaan pada periode pelaksanaan	Menyesuaikan perencanaan dengan perubahan SOTK
2	Perubahan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 - 2024 pada tanggal 25 September 2020, sehingga kegiatan yang dilaksanakan tidak selaras dengan target pada Rencana Strategis	Menyusun Renstra Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun 2020 - 2024 berdasarkan Renstra Kementerian PUPR Tahun 2020 - 2024, Menyusun <i>cascading</i> dan mencocokkan kegiatan yang sudah berjalan dengan target pada renstra
3	Perubahan sistem input rencana di Bappenas dan Kementerian Keuangan	Melakukan pelatihan singkat penggunaan sistem terbaru aplikasi Krisna dan SAKTI







Rekomendasi dalam pelaksanaan kegiatan, yaitu:

- ①. Masih harus dikaji lebih dalam terkait dengan target dan pendanaan untuk pembiayaan perumahan dikarenakan adanya banyak kebijakan yang masih tumpang tindih;
- ②. Berdasarkan target KPBUR Perumahan 2020 - 2024, yaitu untuk mendukung *major project* Rumah Susun 1 Juta Unit perlu dipastikan untuk lokasi detailnya dan kondisi lahan;
- ③. Berdasarkan target tersebut, masih terdapat kekurangan anggaran/pendanaan dalam *baseline* perkiraan maju tahun 2021 - 2024.

1.2. Studi Pendahuluan Proyek KPBUR Rumah Susun Pekerja atau Aparatur Sipil Negara (ASN)

Kegiatan penyusunan Studi Pendahuluan Proyek KPBUR Rumah Susun Pekerja atau Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan kegiatan penyusunan Studi Pendahuluan di lokasi terpilih berada di Kabupaten Karawang dengan memanfaatkan lahan BMN Bina Marga Kementerian PUPR. Studi Pendahuluan Proyek KPBUR Rumah Susun Sewa Karawang Spuur terdiri atas Kajian Kebutuhan, Kajian Kepatuhan, Kajian Value for Money, dan Kajian Potensi Pendapatan dan Skema Pembiayaan.

Ruang lingkup proyek KPBUR Karawang Spuur adalah sebagai berikut:

1.	Nama Proyek	Proyek KPBUR Rumah Susun Sewa Karawang Spuur		
2.	Lokasi Proyek	Jalan Kampung Budaya, Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat		
3.	PJPK	Kementerian PUPR		
4.	Status Tanah	BMN Setditjen Bina Marga (Surat Pelepasan Hak)		
5.	Luas Lahan	1.9 Ha		
6.	Kondisi Eksisting	Belum Dimanfaatkan (<i>idle</i>)		
7.	Kelebihan	 2.2 Km ke Gerbang Tol Karawang Barat 1	 850 m ke Halte Karaba Indah	 Lahan Lokasi sudah diurug
		 Lokasi Dekat Kawasan Industri	 1.4 km dari Apartemen Perumnas Sentraland	 1.7 km ke Hotel Novotel, Favehotel, Citra Grand Hotel

8.	Rencana Rusun dan Fasilitas Bangunan Lainnya	
	Tipe Rusun	Rusun Sewa <i>Mixed Use</i>
	Peruntukan	Hunian: ► MBR ► Non MBR Non Hunian: ► Ruang Terbuka Hijau (Taman) ► Pertokoan ► Sarana Olahraga ► Klinik ► Pusat Pertokoan
	Jumlah Tower	2 Tower
	Jumlah Lantai	25 Lantai/Tower
	Jumlah Unit	1.175 Unit
	Estimasi CAPEX	Rp307.000.000.000
	Estimasi OPEX	Rp130.000.000.000
9.	Rekomendasi Bentuk KPBU	D-B-F-M-O-T (<i>Design-Build-Finance-Maintain-Operate-Transfer</i>)

Dengan menimbang hal-hal sebagai berikut:

- ①. Perda Kabupaten Karawang No 2 Tahun 2013 Pasal 52 Ayat 11 yang menyatakan bahwa pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan di Kabupaten Karawang salah satunya melalui pengembangan Rumah Susun Sewa dan Milik;
- ②. Perhitungan bisnis proyek agar Pemerintah dapat memenuhi kebutuhan Hunian MBR dan Badan Usaha Pelaksana mendapat keuntungan yang adil;
- ③. Status lahan proyek yang merupakan BMN Kementerian PUPR; dan
- ④. Keunggulan lokasi proyek.

Maka di dalam Studi Pendahuluan, hunian yang direkomendasikan pada proyek KPBU berupa Rumah Susun Sewa *Mixed Use*, dengan menyasar MBR dan pekerja industry dengan jumlah perkiraan unit yaitu 1.175 unit hunian yang terbagi pada 2 tower dan masing - masing tower terdiri dari 25 lantai.

Skema KPBU yang direkomendasikan berupa skema berbasis ketersediaan layanan infrastruktur atau DBFMOT (Design - Build - Finance - Maintain - Operate - Transfer) atau BOT (Building - Operate - Transfer) yang lebih diperluas lingkupnya. Pada opsi ini PJPK akan mendelegasikan dalam mendesain, membangun, mencari pembiayaan, melaksanakan pemeliharaan pada masa tertentu dan transfer pada akhir perjanjian kerjasama. Selain itu skema pengembalian investasi proyek KPBU yang direkomendasikan yaitu skema Pembayaran Berdasarkan Ketersediaan Layanan atau dikenal dengan Availability Payment atau AP.

1.3. Outline Business Case (OBC) / Kajian Awal Pra Studi Kelayakan

Sejak tahun 2019, terdapat 3 (tiga) proyek KPBU yang berada pada tahap Kajian Pra Studi Kelayakan / *Outline Business Case* (OBC) antara lain Proyek KPBU Rumah Susun Cisaranten Bina Harapan, Ujung Berung, Bandung; Proyek KPBU Rumah Susun Sei Mangkei, Simalungun,

Sumatera Utara; Proyek KPBU Rumah Susun Paldam Siliwangi, Bandung. Kemudahan pada tahun 2020, terdapat 3 (tiga) proyek baru KPBU Bidang Perumahan yang memasuki Tahap OBC, yaitu Proyek KPBU Rumah Susun Karawang Spuur; Proyek KPBU Rumah Susun Daan Mogot, Jakarta; Proyek KBU Rumah Susun Desa Besar, Medan.

①. Proyek KPBU Rusun Cisaranten Bina Harapan, Ujung Berung, Bandung

Proyek KPBU Bidang Perumahan terletak di Kecamatan Arcamanik Kota Bandung di atas lahan seluas 5,9 hektar dengan status lahan tercatat sebagai Barang Milik Negara (BMN) PUPR. Proyek ini diprakarsai oleh Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Rencana Pemanfaatan Lahan akan dibangun dengan 4 menara apartemen dengan masing - masing 20 lantai sehingga akan dapat menyediakan huniat sebanyak 2.189 unit. Usulan KPBU yang dilaksanakan adalah *Design - Build - Finance - Operation and Maintenance* serta transfer pada masa konsesi tertentu.

②. Proyek KPBU Rusun Sei Mangkei, Simalungun, Sumatera Utara

Proyek KPBU Rusun Sei Mangkei, Simalungun berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei yang ditetapkan berdasarkan PP No. 29 Tahun 2012 memiliki luas lahan 2,5 Ha yang mulai beroperasi 27 Januari 2015 dan diproyeksikan menyerap tenaga kerja sebanyak 83.304 orang ini. Hal ini akan memberi dampak terhadap kebutuhan rumah tinggal bagi para pekerja beserta fasilitas prasarana dan sarana pendukungnya karena sebagian besar pekerja berasal dari luar kawasan. Dengan dibangunnya Rumah Susun bagi pekerja dan fasilitas pendukung (terintegrasi) lainnya, maka dapat menjawab permasalahan kebutuhan para pekerja KEK Sei Mangkei dan menambah minat investor yang akan menanamkan modalnya di KEK Sei Mangkei. Proyek KPBU Rusun Sei Mangkei sendiri merupakan di atas lahan BMD Provinsi Sumatera Utara.

③. Proyek KPBU Rusun Paldam Siliwangi, Bandung

Proyek Rusun Paldam Siliwangi Bandung adalah proyek KPBU dengan luas 11.336 m² dengan menggunakan lahan milik Pemerintah Kota Bandung. Lokasi lahan berada di pusat Kota Bandung dengan aksesibilitas yang mudah dari jalan arteri. Proyek ini akan dibangun dengan 3 tower dengan ketinggian 15 lantai, 18 lantai, dan 18 lantai dan dapat menyediakan hunian sebanyak 1.134 unit. Perkiraan nilai investasi adalah sebesar Rp 414.000.000.000,00 dengan biaya konstruksi adalah sebesar Rp 266.000.000.000,00. Perkiraan nilai IRR adalah 15% dan NPV sebesar Rp 0,084 triliun.

④. Proyek KPBU Rusun Karawang Spuur

Proyek KPBU Rumah Susun Sewa Karawang Spuur merupakan proyek KPBU di atas lahan BMN PUPR dengan luas lahan sebesar 1,9 hektar. Perkiraan jumlah hunian yang akan dibangun adalah sebanyak 1.175 unit yang terdiri dari 2 (dua) dengan masing - masing menara terdiri dari

25 lantai hunian. Perkiraan jumlah CAPEX adalah sebesar Rp 307.000.000.000,00 dan perkiraan jumlah OPEX adalah sebesar Rp 130.000.000.000,00.

⑤. Proyek KPBU Rusun Daan Mogot, Jakarta

Proyek KPBU Rusun Daan Mogot merupakan proyek KPBU yang berada di atas lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berada di Jalan Daan Mogot KM 18, Jakarta Pusat. Lahan seluas 47.599 m² berada di area strategis yang bersebelahan dengan SPBU dan hanya berjarak 1,7 km dengan Terminal Kalideres dan dilewati transportasi publik. PJPk yang melaksanakan proyek KPBU tersebut adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

⑥. Proyek KPBU Rusun Desa Besar, Medan

Proyek KPBU Rusun Desa Besar, Medan berada di lahan milik BMN PUPR yang merupakan tanah *idle* yang belum dimanfaatkan dan berada di pinggir Jalan Tol Belmera, Sumatera Utara. Status lahan sudah *clear* dan *clean* dengan luas lahan sebesar 5,9 hektar.

1.4. Final Business Case (FBC) / Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 - 2024, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan memiliki target 1 (satu) proyek KPBU yang sudah memasuki tahap Kajian Akhir Pra Studi / *Final Business Case* (FBC) yaitu Proyek KPBU Rusun Cisaranten Bina Harapan - Ujung Berung, namun tidak dapat tercapai pada tahun 2020 karena Pandemi Covid - 19 sehingga penyelesaian OBC terhambat, selain itu terdapat isu lahan seluas 4.360 m² yang perlu dibebaskan, sehingga Proyek KPBU Rusun Cisaranten Bina Harapan - Ujung Berung tidak mencapai target pelaksanaan FBC di tahun 2020.

1.5. Pemetaan Peran Pemangku Kepentingan dalam Sistem Pembiayaan Perumahan di Indonesia

1.6. Pengembangan Skema Pembiayaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha

1.7. Penyusunan / Penyiapan Fasilitas e-Building Management untuk Mengukur Pencapaian Persyaratan Pemenuhan Availability Payment (Service Level Agreement)

2) Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Sasaran kegiatan ini memiliki Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Indikator Kinerja Kegiatan adalah Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan

Program Dukungan Manajemen						
Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya						
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan						
Target		Capaian				
2,00%		2,00%				
No	Jenis Indikator / Output Kegiatan / Paket Kegiatan / Capaian Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Bobot (%)	Capaian (%)
	Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat	%	100%	100%	2,00%	2,00%
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	2,00%	2,00%
	Operasional Direktorat	Layanan	1	1	2,00%	2,00%

1) Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan

- ①. Prosentase Rumah Tangga yang Mendapat Fasilitas Pembiayaan Perumahan Melalui Sumber Pembiayaan Primer, Sumber Pembiayaan Sekunder dan Tapera dengan output kegiatan yaitu Fasilitas Pembiayaan Perumahan.
- ②. Prosentase Rumah Tangga yang mendapat Bantuan Pembiayaan Perumahan yang memiliki output kegiatan yaitu:
 - i. Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan;
 - ii. Fasilitas Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka.
- ③. Tingkat Implementasi Penyusunan Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan yang memiliki output kegiatan sebagai berikut:
 - i. Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan;
 - ii. NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan;
 - iii. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan;
 - iv. Fasilitas Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan.

	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
--	--

Sasaran Strategis: Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman, dan Terjangkau							
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan							
Target			Capaian				
50,00%			42,06%				
No	Jenis Indikator / Output Kegiatan / Indikator Output Kegiatan / Paket Kegiatan / Capaian Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Realisasi (%)	Bobot (%)	Capaian (%)
	Prosentase Rumah Tangga yang Mendapat Fasilitas Pembiayaan Perumahan Melalui Sumber Pembiayaan Primer, Sumber Pembiayaan Sekunder dan Tapera	%	100%	100%	100%	30%	30%
A	Fasilitas Pembiayaan Perumahan	Layanan	1	1	1	100%	100%
	Jumlah Pelaksanaan Fasilitas Pembiayaan Perumahan: SMF (Dana Masyarakat)						
1	Dukungan Pembiayaan Perumahan Melalui Sumber Pembiayaan Sekunder Perumahan dan Tabungan Perumahan Rakyat (SMF)	Rumah Tangga	8.460	8.460	100%	70%	70%
	Jumlah Pelaksanaan Fasilitas Pembiayaan Perumahan: Tapera (Dana Masyarakat)						
2	Dukungan Pembiayaan Perumahan Melalui Sumber Pembiayaan Sekunder Perumahan dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)	Rumah Tangga	50.000	Belum Beroperasi	100%	30%	30%
	Prosentase Rumah Tangga yang mendapat Bantuan Pembiayaan Perumahan	%	100%	55,59%	55,59%	50%	27,79 %
A	Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	Rumah Tangga	2.150	1.357	55,59%	40%	22,52 %
	Jumlah Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan						
1	Pelaksanaan Penyaluran Program BP2BT	Rumah Tangga	2.150	1.357	55,59%	100%	63,12 %
B	Fasilitas Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka	Layanan	1	1	50,57%	60%	30,34 %
	Jumlah Pelaksanaan Fasilitas Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka: SSB (BA.999.07)						
1	Pelaksanaan Fasilitas Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka: SSB (BA.999.07)	Rumah Tangga	175.000	90.362	51,64%	50%	25,82 %
	Jumlah Pelaksanaan Fasilitas Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka: SBUM (BA.999.07)						
2	Pelaksanaan Fasilitas Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka: SBUM (BA.999.07)	Rumah Tangga	263.000	130.184	49,50%	50%	24,75 %

Tingkat Implementasi Penyusunan Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan		%	100%	131,67 %	131,67 %	20%	26,33 %
A	Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan	Rekom. Kebijakan	4	7	163,3%	50%	81,67 %
	Jumlah Perumusan Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan				166,67 %	50%	83,33 %
1	Pengembangan dan Penyempurnaan Skema Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Rumah Umum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Draf NSPK	1	3	300%	50%	83,33 %
2	Pengembangan dan Penyempurnaan Skema Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Rumah Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Draf NSPK	1	1	100%		
3	Penghitungan Harga Rumah Bersubsidi Tahun 2021	Draf NSPK	1	1	100%		
	Jumlah Penyusunan dan Penyiapan Penandatanganan Kerja Sama Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan				200%	30%	60%
1	Pelaksanaan Fasilitasi Koordinasi, Sinkronisasi Kebijakan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan	Draf NSPK	1	2	200%	30%	60%
	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan		0	0	100%	20%	20%
B	NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan	Draf NSPK	1	1	100%	20%	20%
	Jumlah Perumusan NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan						
	Pemberdayaan pelaku Pembangunan Rumah Bersubsidi	Draf NSPK	1	1	100%	100%	100%
C	Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	Laporan	4	4	100%	15%	15%
	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan						
1	Strategi Pelibatan Pemerintah Daerah dalam Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan/Bantuan Pembiayaan Perumahan	Laporan	1	1	100%	100%	100%
2	Penatalaksanaan Monitoring dan Evaluasi Bantuan/Kemudahan Pembiayaan Perumahan dengan Geo-Enables Monitoring and Supervision (GEMS)	Laporan	1	1	100%		

3	Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Wilayah 1	Laporan	1	1	100%		
4	Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Wilayah 2	Laporan	1	1	100%		
D	Fasilitasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	Layanan	1	1	100%	15%	15%
	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan						
1	Dana Operasional untuk Mendukung Pelaksanaan Penyaluran Dana Subsidi Bunga Kredit Perumahan dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	Layanan	1	1	100%	15%	15%
2	Oprasional PHLN						
3	Pendampingan Program Pelaksanaan Penyaluran Program BP2BT						
4	Penyiapan Tata Kelola Pengawasan, Pengendalian, dan Penanganan Pengaduan Program BP2BT						
5	Pengembangan Kapasitas untuk Pembiayaan kepada Kelompok Penghasilan Tidak Tetap						

4.1.1. PERBANDINGAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 - 2021 terdapat perubahan dalam *cascading* pada Program hingga Output Kegiatan yang dilaksanakan oleh unit organisasi dan unit kerja, sehingga perbandingan kinerja terhadap 2019 dianggap sebagai *baseline* pada target tahun 2020 yaitu sebagai berikut:

Program	Sasaran Strategis	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Jenis Indikator	Baseline 2019	Target 2020	Realisasi 2020
Dukungan Manajemen	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan	Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan Paket Investasi Pembiayaan Perumahan (%)	0%	25,00%	24,25%

Program	Sasaran Strategis	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Jenis Indikator	Baseline 2019	Target 2020	Realisasi 2020
						Tingkat implementasi kegiatan transaksi Paket Investasi Pembiayaan Perumahan (%)			
						Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat (%)	2,00%	2,00%	2.00%
Perumahan dan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Prosentase Rumah Tangga	42,11%	50.00%	42,06 %

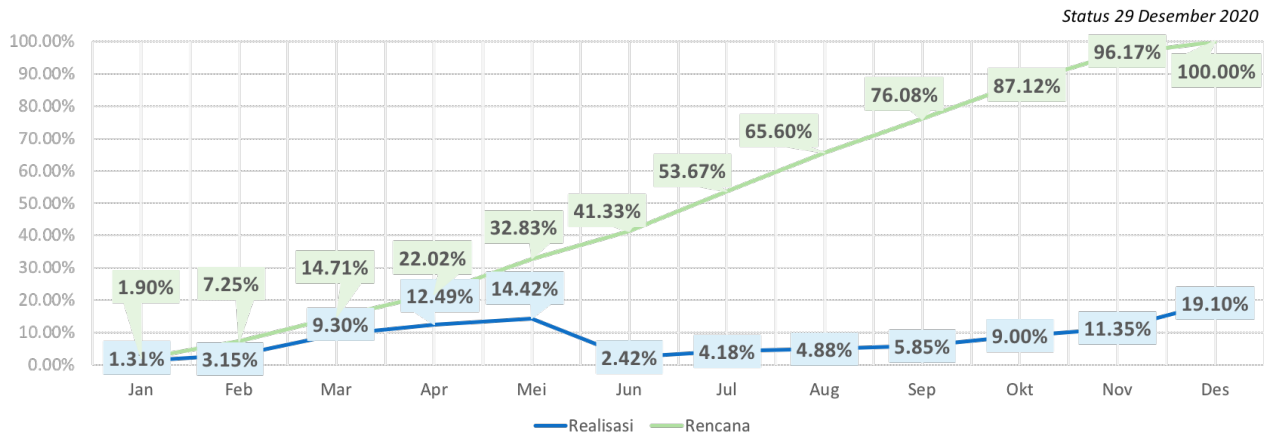
Program	Sasaran Strategis	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Jenis Indikator	Baseline 2019	Target 2020	Realisasi 2020
Kawasan Permukiman	Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman, dan Terjangkau	Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman	Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan	Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	yang Mendapat Fasilitas Pembiayaan Perumahan Melalui Sumber Pembiayaan Primer, Sumber Pembiayaan Sekunder dan Tapera (%)			
						Prosentase Rumah Tangga yang mendapat Bantuan Pembiayaan Perumahan (%)			
						Tingkat implementasi penyusunan kebijakan bantuan Pembiayaan Perumahan (%)			

Baseline 2019 Sasaran Kinerja Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan adalah sebesar 0% karena Sasaran Kinerja tersebut merupakan Sasaran Kinerja terkait langsung dengan Pembiayaan Infrastruktur salah satunya melalui skema KPBU sedangkan pada tahun 2019 pelaksanaan tugas dan fungsi terkait dengan Pembiayaan Infrastruktur melalui skema KPBU belum berjalan sepenuhnya atau masih pada masa transisi karena adanya perubahan struktur organisasi semula Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan menjadi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sesuai dengan amanat pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga pada Sasaran Kegiatan tersebut baseline pada tahun 2019 dianggap sebagai 0%.

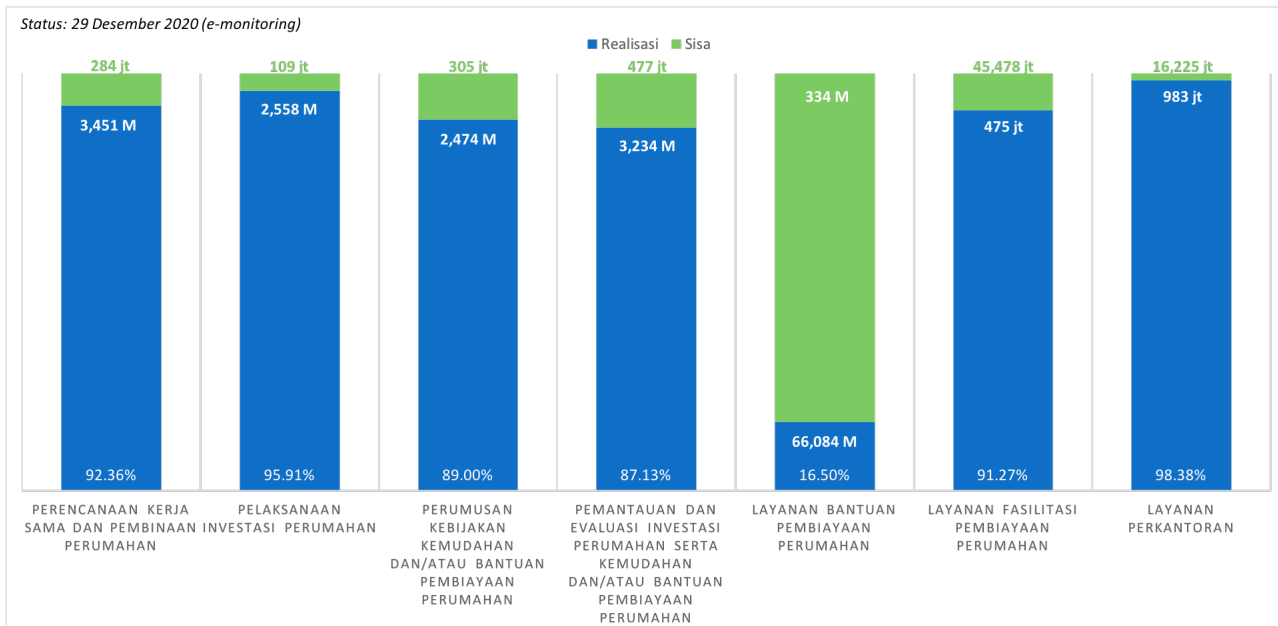
Pada Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan dengan Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pembiayaan Perumahan pada Program Perumahan dan Kawasan Permukiman terdapat penurunan pada tahun 2020 dibandingkan dengan Baseline 2019 yaitu 42,06% yang semula pada baseline yaitu sebesar 42,11%. Penurunan ini diakibatkan karena capaian penyaluran Kemudahan dan Bantuan seperti BP2BT, SSB, dan SBUM hanya mencapai masing - masing sebesar 43,12%, 51,64%, dan 49,50% dari target yang ditetapkan. Penurunan ini terjadi karena penurunan daya beli dan juga minat pasar terhadap perumahan yang terdampak oleh Pandemi Covid-19.

4.2. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran BA.033 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun 2020 berdasarkan e-monitoring PUPR adalah sebesar Rp 79.259.697.000,00 atau sekitar 19,10% dari pagu yang diterima oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan pada Tahun Anggaran 2020 yaitu sebesar Rp 414.913.541.000,00.

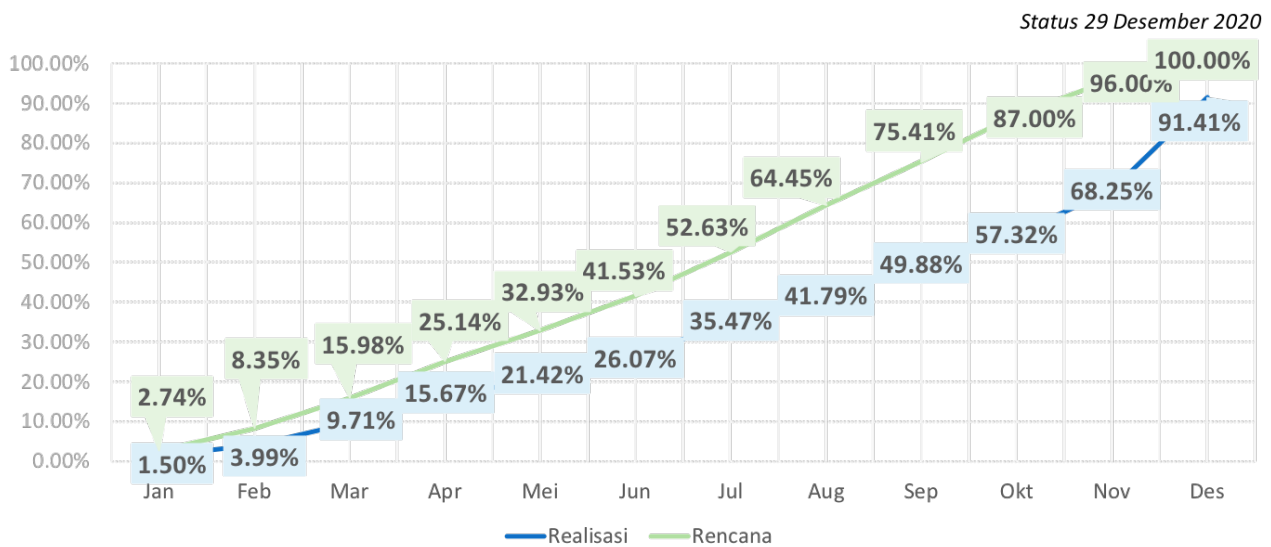


REALISASI	BULAN											
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
Persentase Keuangan	1,31%	3,15%	9,30%	12,49%	14,42%	2,42%	4,18%	4,88%	5,85%	9,00%	11,35%	19,10%
Penyerapan Keuangan (x Rp 1.000,00)	505.467	1.215.763	3.590.094	4.234.852	5.268.415	10.047.432	17.335.611	20.257.238	24.287.751	37.325.273	47.083.179	79.259.697



Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan berdasarkan masing - masing Rincian Output adalah sebesar 92,36% capaian Rincian Ouput Perencanaan Kerja Sama dan Pembinaan Perumahan, 95,91% capaian Rincian Ouput Pelaksanaan Investasi Perumahan, 89,00% capaian Perumusan Kebijakan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan, 87,13% capaian Pemantauan dan Evaluasi Investasi Perumahan serta Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan, 16,00% capaian Layanan Bantuan Pembiayaan Perumahan, 91,27% capaian

Layanan Fasilitas Pembiayaan Perumahan, dan 98,38% capaian Rincian Output Layanan Perkantoran.



REALISASI	BULAN											
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
Persentase Keuangan	1,50%	3,99%	9,71%	15,67%	21,42%	26,07%	35,47%	41,79%	49,88%	57,32%	68,25%	91,41%
Penyerapan Keuangan (x Rp 1.000,00)	285.918	762.337	1.855.500	4.234.852	3.087.807	5.112.693	6.023.318	6.023.318	7.188.874	8.262.017	9.837.167	13.175.228

Sumber dana Rincian Output Layanan Bantuan Pembiayaan Perumahan berasal dari Pinjaman / Hibah Luar Negeri (PHLN) sebesar Rp 400.500.000.000,00 atau sekitar 96,53% dari seluruh pagu yang dimiliki oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan. Rincian Output tersebut merupakan Rincian Output yang terkait langsung dengan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) yang dalam penyalurannya pada tahun 2020 terjadi kendala karena terdampak oleh Pandemi Covid-19. Sehingga capaian kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan tanpa PHLN adalah sebesar Rp 13.175.228,00 atau sebesar 91,41% dari total pagu tanpa PHLN yaitu sebesar Rp 14.413.541.000,00.

No	Kode	Kegiatan / Output / Suboutput (Paket) / Komponen (Sub Paket)	Pagu (x Rp 1,00)	Realisasi (x Rp 1,00)	Keuangan (%)		Fisik	
					RN	RL	RN	RL
1	4199	Penyelenggaraan dan Pembinaan Pembiayaan Perumahan	414,913,541,000	79,259,697,000	100.00%	19.10%	100.00%	20.18%
2	4199.001	Perencanaan Kerja Sama dan Pembinaan Perumahan	3,735,503,000	3,451,369,000	100.00%	92.39%	100.00%	100.00%
3	001.051	Pelaksanaan Koordinasi dan Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan	1,335,684,000	1,221,738,000	100.00%	91.47%	100.00%	100.00%
4	051.A	Pemetaan Peran Pemangku Kepentingan dalam Sistem Pembiayaan Perumahan di Indonesia	640,268,000	618,279,000	100.00%	96.57%	100.00%	100.00%
5	051.B	Penanganan Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di lingkungan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	695,416,000	603,459,000	100.00%	86.78%	100.00%	100.00%
6	001.052	Perencanaan Kerja Sama Pembiayaan Perumahan	1,503,080,000	1,427,223,000	100.00%	94.95%	100.00%	100.00%
7	052.A	Penyusunan Identifikasi Potensi Proyek KPBU Bidang Perumahan	575,708,000	540,170,000	100.00%	93.83%	100.00%	100.00%
8	052.B	Studi Pendahuluan Prouek KPBU Rumah susun Pekerja atau Aparatur Sipil Negara (ASN)	463,373,000	450,054,000	100.00%	97.13%	100.00%	100.00%
9	052.C	Studi Pendahuluan Proyek KPBU Rumah Susun TOD	463,999,000	436,999,000	100.00%	94.18%	100.00%	100.00%
10	001.053	Perumusan Kebijakan dan Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan	896,739,000	802,408,000	100.00%	89.48%	100.00%	100.00%
11	053.A	Penyusunan Program dan Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	388,327,000	366,601,000	100.00%	94.41%	100.00%	100.00%
12	053.B	Penyusunan Pengembangan dan Koordinasi Pendataan Pembiayaan Perumahan	508,412,000	435,807,000	100.00%	85.72%	100.00%	100.00%

No	Kode	Kegiatan / Output / Suboutput (Paket) / Komponen (Sub Paket)	Pagu (x Rp 1,00)	Realisasi (x Rp 1,00)	Keuangan (%)		Fisik	
					RN	RL	RN	RL
13	4199.002	Pelaksanaan Investasi Perumahan	2,665,244,000	2,556,243,000	100.00%	95.91%	100.00%	100.00%
14	001.054	Penyiapan dan Pelaksanaan Kerja Sama Investasi Bidang Pembiayaan Perumahan	2,304,899,000	2,201,805,000	100.00%	95.53%	100.00%	100.00%
15	054.A	Penyusunan/Penyiapan Fasilitas e-Building Management untuk Mengukur Pencapaian Persyaratan Pemenuhan Availability Paymen (Service Level Agreement)	529,328,000	514,336,000	100.00%	97.17%	100.00%	100.00%
16	054.B	Penyusunan Kriteria Penentuan Badan Usaha Pelaksana Proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Bidang Perumahan	556,888,000	521,693,000	100.00%	93.68%	100.00%	100.00%
17	054.C	Pegembangan Skema Pembiayaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Bidang perumahan	610,085,000	577,057,000	100.00%	94.59%	100.00%	100.00%
18	054.D	Penyusunan Dokumen Pendukung Kegiatan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Bidang Perumahan	608,598,000	588,719,000	100.00%	96.73%	100.00%	100.00%
19	001.055	Pengembangan dan Pendampingan Investasi Pembiayaan Perumahan	360,345,000	354,438,000	100.00%	98.36%	100.00%	100.00%
20	055.A	Pendampingan Pemenuhan Pembiayaan Perumahan	360,345,000	354,438,000	100.00%	98.36%	100.00%	100.00%
21	4199.003	Perumusan Kebijakan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan	2,780,020,000	2,474,130,000	100.00%	89.00%	100.00%	100.00%
22	001.056	Penyusunan Perumusan Kebijakan Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perolehan dan Pembangunan Rumah Umum dan Swadaya	2,012,341,000	1,808,795,000	100.00%	89.89%	100.00%	100.00%

No	Kode	Kegiatan / Output / Suboutput (Paket) / Komponen (Sub Paket)	Pagu (x Rp 1,00)	Realisasi (x Rp 1,00)	Keuangan (%)		Fisik	
					RN	RL	RN	RL
23	056.A	Pengembangan dan Penyempurnaan Skema Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Rumah Umum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	555,055,000	479,387,000	100.00%	86.37%	100.00%	100.00%
24	056.B	Pengembangan dan Penyempurnaan Skema Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Rumah Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	523,555,000	480,664,000	100.00%	91.81%	100.00%	100.00%
25	056.C	Penghitungan Harga Rumah Bersubsidi Tahun 2021	933,731,000	848,744,000	100.00%	90.90%	100.00%	100.00%
26	001.057	Pemberdayaan Pemangku Kepentingan Pelaksana Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan	380,549,000	312,120,000	100.00%	82.02%	100.00%	100.00%
27	057.A	Pemberdayaan Pelaku Pembangunan Rumah Bersubsidi	380,549,000	312,120,000	100.00%	82.02%	100.00%	100.00%
28	001.058	Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembiayaan Perumahan	387,130,000	353,215,000	100.00%	91.24%	100.00%	100.00%
29	058.A	Pelaksanaan Fasilitasi Koordinasi, Sinkronisasi Kebijakan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan	387,130,000	353,215,000	100.00%	91.24%	100.00%	100.00%
30	4199.004	Pemantauan dan Evaluasi Investasi Perumahan serta Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan	3,711,602,000	3,234,017,000	100.00%	87.13%	100.00%	100.00%
31	001.059	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pelaksanaan Kerja Sama Pembiayaan Perumahan	1,173,069,000	953,530,000	100.00%	81.29%	100.00%	100.00%
32	059.A	Penyiapan Model Pembinaan Teknis Pemantauan dan Supervisi KPBU Perumahan	514,389,000	425,252,000	100.00%	82.67%	100.00%	100.00%

No	Kode	Kegiatan / Output / Suboutput (Paket) / Komponen (Sub Paket)	Pagu (x Rp 1,00)	Realisasi (x Rp 1,00)	Keuangan (%)		Fisik	
					RN	RL	RN	RL
33	059.B	Dukungan Pelaksanaan Penyelesaian Likuidasi Aset BAPERTARUM-PNS	658,680,000	528,278,000	100.00%	80.20%	100.00%	100.00%
34	001.060	Pemantuan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	2,459,147,000	2,218,837,000	100.00%	90.23%	100.00%	100.00%
35	060.A	Strategi Pelibatan Pemerintah Daerah dalam Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan/Bantuan Pembiayaan Perumahan	479,586,000	401,974,000	100.00%	83.82%	100.00%	100.00%
36	060.B	Penatalaksanaan Monitoring dan Evaluasi Bantuan/Kemudahan Pembiayaan Perumahan dengan Geo-Enables Monitoring and Supervision (GEMS)	415,629,000	338,901,000	100.00%	81.54%	100.00%	100.00%
37	060.C	Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Wilayah 1	732,823,000	688,212,000	100.00%	93.91%	100.00%	100.00%
38	060.D	Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Wilayah 2	831,109,000	789,750,000	100.00%	95.02%	100.00%	100.00%
39	001.061	Penyusunan Laporan Kinerja Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	79,386,000	61,650,000	100.00%	77.66%	100.00%	100.00%
40	061.A	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	79,386,000	61,650,000	100.00%	77.66%	100.00%	100.00%
41	4199.005	Layanan Bantuan Pembiayaan Perumahan	400,500,000,000	66,084,469,000	100.00%	16.50%	100.00%	17.30%
42	001.062	Operasional Bantuan Pembiayaan Perumahan	9,500,000,000	5,487,550,000	100.00%	57.76%	100.00%	58.37%
43	062.A	Dana Operasional untuk Mendukung Pelaksanaan Penyaluran Dana Subsidi Bunga Kredit Perumahan dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	5,000,000,000	3,206,871,000	100.00%	64.14%	100.00%	65.00%
44	062.B	Operasional PHLN	4,500,000,000	2,280,679,000	100.00%	50.68%	100.00%	51.00%

No	Kode	Kegiatan / Output / Suboutput (Paket) / Komponen (Sub Paket)	Pagu (x Rp 1,00)	Realisasi (x Rp 1,00)	Keuangan (%)		Fisik	
					RN	RL	RN	RL
45	001.063	Penyaluran Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan	391,000,000,000	60,596,919,000	100.00%	15.50%	100.00%	16.31%
46	063.A	Pelaksanaan Penyaluran Program BP2BT	380,000,000,000	53,864,000,000	100.00%	14.17%	100.00%	15.00%
47	063.B	Pendampingan Program Pelaksanaan Penyaluran Program BP2BT	10,900,000,000	6,732,919,000	100.00%	61.77%	100.00%	62.00%
48	063.C	Penyiapan Tata Kelola Pengawasan, Pengendalian, dan Penanganan Pengaduan Program BP2BT	50,000,000	0	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
49	063.D	Pengembangan Kapasitas untuk Pembiayaan kepada Kelompok Penghasilan Tidak Tetap	50,000,000	0	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
50	4199.006	Layanan Fasilitas Pembiayaan Perumahan	521,172,000	475,694,000	100.00%	91.27%	100.00%	100.00%
51	001.064	Koordinasi Fasilitas Pembiayaan Perumahan Melalui Sumber Pembiayaan Primer, Sumber Pembiayaan Sekunder, dan Tapera	521,172,000	475,694,000	100.00%	91.27%	100.00%	100.00%
52	064.A	Dukungan Pembiayaan Perumahan Melalui Sumber Pembiayaan Sekunder Perumahan dan Tabungan Perumahan Rakyat	521,172,000	475,694,000	100.00%	91.27%	100.00%	100.00%
53	4199.994	Layanan Perkantoran	1,000,000,000	983,775,000	100.00%	98.38%	100.00%	100.00%
54	001.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1,000,000,000	983,775,000	100.00%	98.38%	100.00%	100.00%
55	002.A	Operasional Direktorat	1,000,000,000	983,775,000	100.00%	98.38%	100.00%	100.00%

BAB 5

PENUTUP

Bab ini menguraikan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan tahun 2019 dan rekomendasi dan langkah tindak lanjut ke depan.

BAB 5 PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

(Pada bulan Februari tahun 2019 terjadi restrukturisasi organisasi sesuai dengan amanat Permen PUPR Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan diubah menjadi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan terdiri dari Sekretariat Direktorat Jenderal dan lima direktorat yaitu Direktorat Perumusan Kebijakan dan Evaluasi, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, dan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman. Direktorat Pola Pembiayaan Perumahan menjadi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dengan tugas semula melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pola pembiayaan perumahan menjadi menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isu strategis Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan antara lain:

1. Pemantapan Regulasi;
2. Rancangan Kebijakan Kemudahan dan/atau Bantuan;
3. Capaian Kemudahan dan/atau Bantuan;
4. Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera);
5. Dukungan Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*);
6. Mitra Kerja Utama Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan.

Visi pembiayaan perumahan adalah mewujudkan sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel dan misi yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi bidang pembiayaan perumahan adalah:

1. Mengembangkan skema - skema bantuan pembiayaan perumahan sebagai upaya meningkatkan keterjangkauan MBR untuk menempati hunian yang layak;
2. Meningkatkan jumlah Lembaga keuangan yang mendapat fasilitas bantuan pembiayaan perumahan sebagai upaya menciptakan sistem pembiayaan yang berkelanjutan;
3. Mendorong pemanfaatan sumber - sumber pembiayaan, khususnya pembiayaan jangka panjang, sebagai upaya menciptakan sistem pembiayaan yang berkelanjutan;
4. Mendorong dan meningkatkan investasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;

5. Meningkatkan peran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembiayaan perumahan.

Tujuan pembangunan perumahan 2015 - 2019 bidang pembiayaan perumahan adalah meningkatkan daya beli dan aksesibilitas MBR ke lembaga - lembaga pembiayaan perumahan yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel. Sasaran strategis pembiayaan perumahan 2015 - 2019 untuk mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya penyusunan dan diseminasi norma, peraturan, dan kriteria (NPK) di bidang pembiayaan perumahan, termasuk atas turunan peraturan perundang-undangan mengenai perumahan dan kawasan permukiman;
2. Meningkatnya jumlah masyarakat, khususnya MBR, yang dapat mengakses lembaga pembiayaan perumahan melalui pilihan-pilihan skema pembiayaan yang semakin sesuai, terjangkau, cepat, dan berkelanjutan;
3. Terlaksananya dukungan dan fasilitasi pengembangan pasar pembiayaan primer perumahan dan pasar pembiayaan sekunder perumahan, termasuk penambahan dana PMN pada PPSP, dan mendorong penerbitan regulasi yang mendukung pemanfaatan dana jangka panjang untuk pembiayaan perumahan;
4. Terlaksananya operasionalisasi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera);
5. Meningkatnya peran/partisipasi dan kapasitas LKB, LKBB, dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembiayaan perumahan dengan tetap memperhatikan prinsip *good governance*;
6. Berkembangnya bantuan pembiayaan perumahan yang semakin efisien dan efektif; dan
7. Meningkatnya penempatan dana jangka panjang (dana haji, dana asuransi, dana pensiun, dana jaminan sosial, dan dana Tabungan Wajib Perumahan TNI/Polri) pada instrumen keuangan pembiayaan perumahan.

Arah kebijakan pembiayaan perumahan tahun 2015 - 2019, adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan regulasi dan kebijakan untuk menciptakan iklim yang kondusif, serta koordinasi pelaksanaan kebijakan di tingkat pusat dan daerah.
2. Terkait dengan KPR Rumah Umum yaitu:
 - a. Peningkatan penerbitan KPR-FLPP Rumah Umum untuk rumah tapak dan rumah susun;
 - b. Pengembangan skema pembiayaan perumahan yang lebih terjangkau, efisien, dan akuntabel.
3. Peningkatan peran Lembaga pembiayaan sekunder baik melalui peningkatan nilai sekuritisasi aset, penerbitan obligasi dan pemberian pinjaman (*financing*).
4. Operasionalisasi program Tapera, termasuk operasionalisasi BP Tapera, penerbitan peraturan pelaksana program, dan mendorong integrasi Tapera dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

5. Penempatan sumber dana, baik dana jangka panjang (dana haji, dana asuransi, dana jaminan sosial, dan dana TWP TNI/Polri) maupun dana KPBU pada instrumen keuangan yang mendukung pembiayaan perumahan.
6. Peningkatan peran serta Pemda dalam pembiayaan perumahan, khususnya melalui dorongan penerbitan obligasi daerah dan BLUD pembiayaan perumahan melalui sosialisasi, fasilitasi, advokasi, dan penyiapan kelembagaan.

Strategi kebijakan pembangunan perumahan 2015 - 2019 bidang pembiayaan dibagi menjadi tiga sisi yaitu sisi permintaan (*demand side*), sisi pasokan (*supply side*), dan *enabling environment*.

Pada tahun 2019, Perjanjian Kinerja Tahun 2019 mengalami 2 (dua) kali revisi. Perjanjian Kinerja pertama dilakukan pada bulan Januari 2019 yang dilakukan oleh Direktur Pola Pembiayaan Perumahan, kemudian revisi pertama pada tanggal 12 Februari 2019 Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, dan revisi kedua dilakukan pada bulan November 2019 oleh Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan. Perjanjian Kinerja yang dilakukan terdiri dari 1 (satu) sasaran kegiatan yaitu Tersedianya Skema Pembiayaan Perumahan serta Terselenggaranya Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan 7 (tujuh) Indikator Kinerja, yaitu:

- 1) Tingkat ketersediaan skema pembiayaan perumahan serta terselenggaranya penyaluran bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR;
- 2) Jumlah Perumusan Kebijakan dan Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan;
- 3) Jumlah Perumusan Kebijakan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan;
- 4) Jumlah Perencanaan Kerja Sama Pembiayaan Perumahan;
- 5) Jumlah Penyiapan Investasi dan Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan;
- 6) Jumlah Paket Pembiayaan Perumahan;
- 7) Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Investasi Perumahan serta Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan.

Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu faktor yang berperan dalam kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. Jumlah SDM turut mempengaruhi tercapainya kinerja yang telah direncanakan. Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan sebanyak 57 orang dengan komposisi 14 jabatan struktural dan 43 staf, saat ini baru hanya terisi 13 jabatan struktural dan 12 staf PNS dan CPNS. Pegawai Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan saat ini sebanyak 56 orang dengan komposisi 19 orang PNS, 6 orang CPNS, 4 orang Honorer, dan 27 orang Tenaga Ahli Muda / Konsultan Individual (TAM/KI). Sebanyak 24 orang adalah wanita dan 32 orang adalah pria dengan rentang usia <30 tahun sebanyak 33 orang, 30 - 50 tahun sebanyak 15 orang, dan >50 tahun sebanyak 8 orang.

DIPA Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan terdiri dari BA.033 dan BA.999.07. DIPA Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dengan Nomor DIPA-033.08.1.400812/2019

mengalami revisi sebanyak 4 kali. Penerbitan pertama diterbitkan pada tanggal 5 Desember 2018 dengan anggaran sebesar Rp 30.200.000.000,00 dan Rp 15.000.000.000,00 dari anggaran tersebut merupakan dana Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN). Revisi ke-2 dilakukan pada tanggal 9 Agustus 2019 dengan penambahan anggaran sebesar Rp 30.379.286.000,00 dan anggaran dengan sumber dana PHLN menjadi sebesar Rp 36.300.086.000,00 sehingga DIPA BA.033 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan pada revisi ke-2 menjadi Rp 60.579.086.000,00. Revisi ke-3 dilakukan pada tanggal 4 November 2019 dengan besar anggaran menjadi Rp 59.394.086.000,00. Revisi ke-4 dilakukan pada tanggal 12 Desember 2019 terdapat penambahan anggaran dengan sumber dana PHLN sebesar Rp 198.420.000.000,00 sehingga dana PHLN menjadi sebesar Rp 234.7220.086.000,00 dan total anggaran BA.033 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan tahun 2019 menjadi sebesar Rp 257.814.086.000,00. Sedangkan BA.999.07 terdiri dari Subsidi Bunga Kredit Perumahan dengan anggaran sebesar Rp 3.452.654.265.000,00 dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan sebesar Rp 948.000.000.000,00.

Capaian kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan pada Program Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan berdasarkan Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja nomor 1 (satu) adalah sebesar 490% dari target sebesar 100%, Indikator Kinerja nomor 2 (dua), 3 (tiga), 6 (enam), dan 7 (tujuh) sebesar 100%. Sedangkan capaian realisasi anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan adalah sebesar Rp 238.074.001.445,00 atau 92,34% dari total pagu bagi Program Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan sebesar Rp 257.814.086.000,00. Sedangkan kinerja pencapaian fisik Program Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan sebesar 99,71%. Kinerja anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan berdasarkan masing - masing Indikator Kinerja adalah sebesar 92,46% capaian Indikator Kinerja 1 (satu), 93,64% capaian Indikator Kinerja 2 (dua), 79,73% capaian Indikator Kinerja 3 (tiga), 96,61% capaian Indikator Kinerja 6 (enam), dan 59,65% Indikator Kinerja 7 (tujuh), sedangkan capaian Indikator Kinerja 4 (empat) dan 5 (lima) tidak dapat diukur karena kegiatan mengalami realokasi anggaran Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sehingga mengalami penghematan anggaran sebesar 100% dari seluruh kegiatan yang berkaitan dengan Indikator Kinerja 4 (empat) dan 5 (lima). Untuk target kinerja Subsidi Bunga Kredit pada bulan Desember adalah 100% dan capaian kinerja pada bulan Desember adalah sebesar Rp 3.529.969.647.622,00 atau sebesar 98,90% sehingga terjadi deviasi negatif capaian kinerja sebesar -1.1%. Target kinerja Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan TA. 2019 adalah 100% dan capaian kinerja pada bulan Desember adalah sebesar 89,85% atau sebesar Rp 747.040.000.000,00. Terdapat deviasi negatif sebesar -10,15% antara target dan capaian. Capaian kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan pada Program Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan berdasarkan Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja nomor 1 (satu) adalah sebesar 490% dari target sebesar 100%, Indikator Kinerja nomor 2 (dua), 3 (tiga), 6 (enam), dan 7 (tujuh) sebesar 100%.

Kendala dan Permasalahan dalam pelaksanaan Program Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan yang dialami oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan adalah:

1. Masih adanya tumpang tindih tugas dan fungsi antar subdit di Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan.
2. Dit. PPP memiliki pagu awal sebesar 30,2 miliar rupiah, namun dalam pelaksanaannya terjadi revisi anggaran menjadi 60,5 miliar rupiah. Sehingga penyerapan bulan Agustus 2019 menjadi hanya sekitar 18,83%.
3. Dit. PPP kekurangan SDM, saat ini sudah terisi 12 namun kebutuhan Ditt. PPP adalah sebanyak 43 orang.

Kendala dan permasalahan dalam melaksanakan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) pada tahun 2019 dikelompokkan berdasarkan *stakeholders* (pemangku kepentingan), antara lain:

1. Pemohon;
2. Tenaga Pendamping Penyaluran;
3. Pemerintah daerah kota/kabupaten;
4. Perbankan;
5. Pengembang.

5.2. LANGKAH KE DEPAN

Tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan pada Tahun Anggaran 2020 adalah:

1. Terkait dengan Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, Dit. PPP perlu menyusun Rencana Strategi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan 2020 - 2024;
2. Penyusunan Panduan Pelaksanaan KPBU Perumahan atas Usulan Pemerintah Daerah;
3. Penyusunan Strategi Pengembangan Skema Kerja Sama Pemerintah, Badan Usaha, dan Masyarakat (KPBUM) dalam Pembangunan Rumah Susun;
4. Penyelesaian penyusunan Rapermen terkait KPR ASN, TNI, dan POLRI;
5. Pedoman pelaksanaan dan ruang lingkup baru TPP BP2BT Tahun Anggaran 2020 dengan terbitnya Permen PUPR No. 13/PRT/M/2019 tentang BP2BT;
6. Penyusunan *Service Level Agreement* (SLA) untuk Proyek KPBU Bidang Perumahan;
7. Penerapan penyusunan tarif sewa pada Rumah Susun yang akan dijalankan dengan KPBU;
8. Pengembangan inovasi skema KPR Mikro, penyaluran kemudahan dan bantuan melalui Lembaga keuangan non-bank.
9. Pengawasan dilakukan oleh Manajemen Konstruksi (MK) / pengawas bersertifikat setelah SLF dihilangkan dari syarat utama pengajuan BP2BT.

Strategi yang dapat dilaksanakan pada tahun 2020 oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan antara lain terkait dengan:

2. Identifikasi Proyek KPBU;

3. Alternatif Sumber Penganggaran untuk Penyiapan Proyek KPBU;
4. Koordinasi dan Fasilitasi Bank Pelaksana, Pembiayaan Sekunder, dan Tapera;
5. Koordinasi Pendataan Pembiayaan Perumahan.

LAMPIRAN

Dokumentasi Kegiatan

Penyusunan Pedoman Identifikasi Peran Masyarakat

Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Tempat
24 April 2019	<i>Trilateral Meeting</i> Lanjutan Nomenklatur Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun Anggaran 2020	Jakarta
13 Juni 2019	Rapat Penyiapan Konsep Rencana Strategis Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan TA. 2020 - 2024	Jakarta
5 Juli 2019	Rapat Identifikasi Potensi KPBU Perumahan di Provinsi Sumatera Selatan	Palembang
16 Oktober 2019	Usulan Target dan Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan 2020 - 2024	Bogor
16 Oktober 2019	Rapat Penyiapan Roadmap KPBU Bidang Perumahan Tahun 2020 - 2024	Bogor
10 Desember 2019	Rapat Pembahasan Drafy Renstra Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan 2020 - 2024	Tangerang Selatan



Penyusunan Tata Kelola Penyaluran Subsidi Perumahan

Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Tempat	Dokumentasi
4 Oktober 2019	Rapat Penyempurnaan Tata Kelola Penyaluran Subsidi Bunga Kredit Perumahan dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	Tangerang Selatan	
9 Oktober 2019	Rapat Penyempurnaan Tata Kelola Penyaluran Subsidi Bunga Kredit Perumahan dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	Jakarta	

Penyusunan Rencana dan Strategi Pengembangan Pola Pembiayaan

a) Pemetaan Kegiatan dalam Rangka Optimalisasi Pelaksanaan Sektor Pembiayaan Perumahan

Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Tempat
27 - 29 Maret 2019	Rapat Koordinasi Pembiayaan Perumahan Tahun Anggaran 2019	Kota Cirebon
26 April 2019	Rapat <i>Expose</i> Hasil Identifikasi Tanah BMN Kementerian PUPR untuk KPBU Perumahan	Kota Jakarta Selatan
13 Juni 2019	Rapat Penyiapan Konsep Rencana Strategis Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan TA 2020 - 2024	Kota Jakarta Selatan
5 Juli 2019	Rapat Identifikasi Potensi KPBU Perumahan di Provinsi Sumatera Selatan	Kota Palembang

b) Pengembangan Skema dan Mekanisme Kemudahan dan/atau Bantuan Penerimaan Rumah bagi MBR

Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Tempat	Foto Kegiatan
22 Februari 2019	Rapat Pembahasan Dasar Hukum Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Pemilikan Rumah bagi ASN, TNI, dan POLRI	Kota Jakarta Selatan	
25 Maret 2019	Rapat Percepatan Penyiapan Penyediaan Perumahan bagi ASN, TNI, dan POLRI	Kota Jakarta Selatan	
26 Maret 2019	Rapat Penyiapan Peraturan Perundangan Pembiayaan Perumahan bagi ASN, TNI, dan POLRI	Kota Jakarta Selatan	
20 Mei 2019	Rapat Pembahasan Finalisasi Rancangan Keputusan Menteri PUPR tentang Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera Tapak Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi	Kota Jakarta Selatan	

Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Tempat	Foto Kegiatan
24 juni 2019	Sosialisasi dan Rencana Pelaksanaan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 535/KPTS/M/2019 tentang Batasan Harga Jual Rumah Subsidi	Kota Jakarta Selatan	
4 September 2019	Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah bagi MBR	Kota Jakarta Selatan	
1 Oktober 2019	Rapat Pembahasan Uang Muka KPR Bersubsidi	Kota Jakarta Selatan	

Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Tempat	Foto Kegiatan
12 November 2019	Rapat usulan Penggunaan Produk Kredit Komersial Khusus Guna Penyaluran Tambahan FLPP Tahun 2019 untuk Selanjutnya Dialihkan Menjadi Kredit FLPP pada Tahun 2020	Kota Jakarta Selatan	
14 - 15 November 2019	Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah bagi MBR	Kota Tangerang Selatan	
18 - 19 November 2019	Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah bagi MBR	Kota Tangerang Selatan	

Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Tempat	Foto Kegiatan
4 Desember 2019	Rapat Tindak Lanjut Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Rumah bagi ASN, TNI, dan POLRI	Kota Jakarta Selatan	
10 - 11 Desember 2019	Rapat Tindak Lanjut Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Kemudahan dan Bantuan Pemilikan Rumah MBR	Kota Tangerang	
17 Desember 2019	Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Rumah bagi ASN/TNI/POLRI	Kota Jakarta Selatan	

c) **Penyusunan Rencana dan Strategi Pengembangan Pola Investasi Perumahan Tahun Anggaran 2020 - 2025**

Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Tempat
Setiap Minggu Pertama di awal bulan	Rapat Internal Kegiatan	Kota Jakarta Selatan
14 Oktober 2019	<i>Focus Group Discussion</i> (FGD) / Rapat Diskusi Kelompok Terbatas Identifikasi	Kota Jakarta Selatan

Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Tempat
	Permasalahan Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan	
2 Desember 2019	FGD Tantangan Dalam Pelaksanaan Investasi Perumahan	Kota Jakarta Selatan

Penyusunan Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan

a) Kajian Alternatif Penyesuaian Pembayaran Subsidi Bunga Kredit Perumahan

Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Tempat	Foto Kegiatan
29 - 30 Agustus 2019	Rapat Evalyasi Perhitungan Subsidi Bunga Kredit Perumahan	Sentul, Bogor	
3 September 2019	Rapat Koordinasi dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan terkait pengambilan keputusan penyelesaian pembayaran Subsidi Bunga Kredit Perumahan	Kota Jakarta Selatan	

Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Tempat	Foto Kegiatan
6 - 7 September 2019	FGD Pembahasan Penyempurnaan Kebijakan Penyaluran Subsidi Bunga Kredit Perumahan	Kota Tnagerang Selatan	
14 Oktober 2019	Rapat dengan Stakeholder dalam rangka menjaring masukan terkait pengambilan kebijakan penyelesaian pembayaran Subsidi Bunga Kredit Perumahan	Kota Jakarta Selatan	

b) Penyusunan Materi Teknis Peningkatan Akses MBR Informal terhadap Pembiayaan Perumahan Berbasis Ekonomi Digital

Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Tempat	Foto Kegiatan
22 Mei 2019	Rapat Persiapan Pelaksanaan Penyaluran Program BP2BT pada MBR Informal melalui Akses Ekonomi Digital	Kota Jakarta Selatan	

Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Tempat	Foto Kegiatan
10 Juli 2019	Rapat Dukungan Bantuan Kemudahan Pembiayaan Perumahan dalam Perolehan Rumah bagi Pelaku Ekonomi Digital	Kota Jakarta Selatan	
16 Agustus 2019	Rapat Lanjutan Dukungan Kemudahan Pembiayaan Perumahan dalam Perolehan Rumah bagi Pelaku Ekonomi Digital	Kota Jakarta Selatan	
12 September 2019	Rapat Pembahasan Kerjasama Dukungan Bantuan Pembiayaan Perumahan dalam Perolehan Rumah bagi Pelaku Ekonomi Digital	Kota Jakarta Selatan	

c) Penyusunan Pedoman Pengadaan Tenaga Penggerak Masyarakat dalam Penyiapan Kelompok Sasaran

Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Tempat
16 - 18 Mei 2019	Bimbingan Teknis TPP BP2BT	Kota Tangerang
31 Oktober - 1 November 2019	Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran BP2BT Tahun 2019	Kota Tangerang Selatan

Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Tempat
9 Desember 2019	FGD Hasil Evaluasi Kinerja TPP BP2BT TA 2019	Kota Tangerang Selatan

Penyusunan Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Perumahan

a) Penyempurnaan Skema Pembiayaan Mikro Perumahan Berbasis Tabungan

Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Tempat
14 Januari 2019	Pembahasan Draf Rancangan Perubahan Peraturan Menteri PUPR terkait BP2BT	Kota Jakarta Selatan
15 Februari 2019	Rapat Pembahasan Draf Perjanjian Kerja Sama	Kota Jakarta Selatan
18 Februari 2019	Rapat Lanjutan Pembahasan Draf Perjanjian Kerja Sama Penyaluran BP2BT Tahun 2019	Kota Jakarta Selatan
26 Februari 2019	Rapat Pembahasan Pengembangan Skema BP2BT	Kota Jakarta Selatan
22 April 2019	Rapat Monitoring Pelaksanaan Program BP2BT dan Pembahasan Target Volume BP2BT	Kota Jakarta Selatan
24 April 2019	Rapat Evaluasi Kesiapan Bank Pelaksana Penyalur BP2BT TA 2019	Kota Jakarta Selatan
29 Mei 2019	Finalisasi Rancangan Keputusan Menteri PUPR dalam Pelaksanaan BP2BT TA 2019	Kota Jakarta Selatan
2 Mei 2019	Rapat Koordinasi Pelaksanaan BP2BT TA 2019	Kota Tangerang
11 Juni 2019	Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri PUPR BP2BT TA 2019	Kota Jakarta Selatan
24 Juli 2019	Rapat Persiapan Sosialisasi Kepmen PUPR Nomor 587/KPTS/M/2019	Kota Jakarta Selatan
29 Juli 2019	Rapat Evaluasi Semester I Penyaluran BP2BT	Kota Jakarta Selatan
18 - 19 Oktober 2019	Workshop Bantuan Pembiayaan Mikro Perumahan Tabungan	Kota Tangerang Selatan

b) Pola Pembiayaan Pembangunan Rumah Swadaya secara Berkelompok

Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Tempat
4 April 2019	Persiapan Penyiapan Pelaksanaan pembiayaan Rumah Swadaya Secara Berkelompok	Kota Jakarta Selatan
2 - 3 Agustus 2019	Diskusi dan Pembahasan Perubahan Peraturan Menteri PUPR Tentang Rumah Swadaya Melalui BP2BT	Kota Tangerang

Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Tempat
6 Agustus 2019	Rapat <i>review</i> Perubahan Peraturan Menteri PUPR Tentang Rumah Swadaya Melalui BP2BT	Kota Jakarta Selatan
15 Agustus 2019	Diskusi dan Pembahasan Lanjutan Perubahan Peraturan Menteri PUPR Tentang Rumah Swadaya Melalui BP2BT	Kota Jakarta Selatan
12 Desember 2019	Rapat Finalisasi Pola Pembiayaan Pembangunan Rumah Swadaya Secara Berkelompok	Kota Bogor

Penyusunan Rumusan Rapermen Pola Investasi Perumahan

Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Tempat	Foto Kegiatan
Setiap minggu pertama di awal bulan	Rapat Internal	Kota Jakarta Selatan	
19 Februari 2019	Diskusi Terbatas dengan Direktorat Rumah Susun dan Direktorat Rumah Umum dan Komersial, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan tentang Pembahasan Persiapan Rumusan Rapermen Standar Pelayanan Minimal pada Pengelolaan Rumah Susun.	Kota Jakarta Selatan	
27 Juni 2019	Rapat Pembahasan Standar Pelayanan Minimal pada Pengelolaan Rumah Susun dengan PT. Jakarta Property Management	Kota Jakarta Selatan	

Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Tempat	Foto Kegiatan
25 Juli 2019	FGD Penyusunan Standar Pelayanan Minimal pada Pengelolaan Rumah Susun dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kota Surabaya.	Kota Surabaya	
7 Oktober 2019	Asistensi Penyusunan Rancangan Rumusan Rapermen Standar Pelayanan Minimal pada Pengelolaan Rumah Susun dengan Akademisi ITB	Kota Bandung	
29 Oktober 2019	Asistensi II Penyusunan Rancangan Rumusan Rapermen Standar Pelayanan Minimal pada Pengelolaan Rumah Susun dengan Akademisi ITB	Kota Bandung	
25 November 2019	Asistensi III Penyusunan Rancangan Rumusan Rapermen Standar Pelayanan Minimal pada Pengelolaan Rumah Susun dengan Akademisi ITB	Kota Bandung	

Perumusan Kebijakan dan Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan

Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Tempat
30 Agustus 2019	Rapat Identifikasi Potensi Proyek KPBU Bidang Perumahan di Batam	Kota Batam
6 September 2019	Rapat Identifikasi Potensi Proyek KPBU Bidang Perumahan di Jawa Tengah	Kota Solo

Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Tempat
9 September 2019	Rapat Pembahasan Kick Off Fasilitasi Penyusunan Dokumen Outline Business Case (OBC) Proyek KPBU Rumah Susun Cisaranten Bina Harapan	Kota Jakarta Pusat
8 Oktober 2019	Kunjungan Kerja ke PT. Pertamina (Persero)	Kota Jakarta Selatan
17 Oktober 2019	Rapat Pembahasan Studi Pendahuluan Rumah Susun Pasar Sekanak Kota Palembang	Kota Bogor

Paket Pembiayaan Perumahan

Tanggal	Nama Kegiatan	Tempat	Dokumentasi Kegiatan
7 Oktober 2019	Kunjungan Lapangan UPT Rusunawa Cingised	Kota Bandung	
24 Oktober 2019	Kunjungan Lapangan Jakarta Property Management	Kota Jakarta Utara	
25 Oktober 2019	Kunjungan Lapangan Asrama Mahasiswa UI	Kota Depok	

Tanggal	Nama Kegiatan	Tempat	Dokumentasi Kegiatan
30 Oktober 2019	Kunjungan Lapangan Perum Perumnas	Kota Jakarta Timur	
18 November 2019	FGD Tata Cara Penyusunan Tarif Sewa Rumah Susun Pada Proyek KPBU	Kota Jakarta Selatan	
5 Desember 2019	Rapat Tindak Lanjut FGD Tata Cara Penyusunan Tarif Sewa Rumah Susun Pada Proyek KPBU	Kota Bandung	

Perjanjian Kinerja

DIPA

Peta Analisis Beban Kerja



Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan
Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat